

**PENGARUH ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN
DAN KEMISKINAN**

**(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun
2006-2009)**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Riza Pusparini

No. Mahasiswa : 08312083

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2012

**PENGARUH ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN
DAN KEMISKINAN**

**(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun
2006-2009)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Riza Pusparini

No. Mahasiswa : 08312083

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

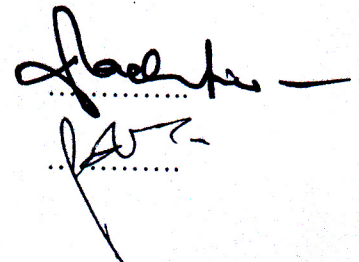
SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Disusun Oleh: RIZA PUSPARINI
Nomor Mahasiswa: 08312083

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 7 Juni 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak, SAS
Penguji : Rifqi Muhammad, SE, M.Sc, SAS



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali saya secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 22 Mei 2012

Penyusun,



(Riza Pusparini)

**PENGARUH ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN
DAN KEMISKINAN**

(Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)

Hasil Penelitian

Diajukan Oleh

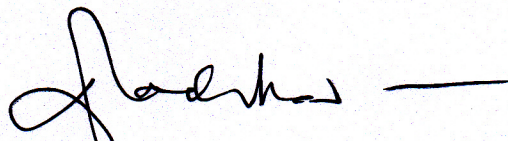
Nama : Riza Pusparini

Nomor Mahasiswa : 08312083

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 22 Mei 2012

Dosen Pembimbing,



Drs. Arief Bachtiar, MSA., Ak

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Ibu dan Bapak, terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungan yang telah engkau berikan padaku sampai saat ini. Sebanyak apapun aku mengucapkan rasa terima kasih, tidak akan pernah bisa menggantikan besarnya kasih sayang yang telah engkau berikan padaku selama ini. Semoga aku bisa memberikan sesuatu yang membanggakan untuk engkau sebagai tanda terima kasihku pada Ibu dan Bapak.

Keempat kakakku, Mbak Dewi, Mbak Ningrum, Mas Priyo dan Mas Dewo, terima kasih atas perhatian, dukungan dan keceriaan yang telah kalian berikan selama ini.

Seluruh teman-temanku dimanapun kalian berada, terima kasih atas segala kebahagiaan dan keceriaan yang telah kalian berikan dalam hidupku sampai saat ini.

MOTTO

“Ingatlah, hanya dengan berdzikir dan mengingat Allah hati akan menjadi tenang”

(QS. Ar Ra'd : 28)

“Jangan melihat kebelakang dengan kemarahan, atau ke depan dengan ketakutan,
tetapi lihatlah ke sekitarmu dengan kewaspadaan”

(James Thurber)

“ Terkadang kita harus salah agar tahu yang benar, kita harus terjatuh agar tahu
cara untuk bangkit.

Terkadang kita harus menangis agar tahu cara untuk tegar, bahkan kita harus
menyesal agar tahu cara menjadi yang lebih baik.”

(Anonim)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan anugerah-Nya, tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN” (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat wajib untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatanskripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan hal tersebut penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi panutan dan suri tauladan.

3. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.,DBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Arief Bachtiar, Drs., MSA., Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, waktu, serta nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibuku tersayang (Bapak Bambang H.N. dan Ibu Sri Hastuti) yang selalu mendoakanku, memotivasi, membimbing dan yang selalu menjadi sumber inspirasiku.
6. Kakak-kakakku (Mbak Dewi, Mbak Ningrum, Mas Priyo dan Mas Dewo), serta keponakanku dedek Adzka atas doa dan dukungannya.
7. Teman-temanku Worira, Mbak Risma, Leli, Ratna, Reni, Yesi, Andina, Nurul, Hesti, Intan, Alif, Rica, Winda, Septi, Yayan, Risti, Anov, dan Nurul 2 serta mbak-mbak mantan Worira yang tidak bias di ucapkan satu persatu, terima kasih banyak atas semua keceriaan yang kalian berikan selama kita bersama di kos ini.
8. Teman-temanku Misscherez, Vita, Widi, Maya, Estu, Feni, Novi, Nisa terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan padaku semasa kita di bangku kuliah.
9. Teman-teman satu bimbingan : Sherly, Adel, Lidya, Tika dan Wening.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bantuan, semangat serta doa yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikan laporan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memebarkan balasan atas segala bantuan dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan ridha Allah selalu menyertai. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembacanya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa apa yang telah disajikan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bimbingan serta pengarahan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik.

Yogyakarta, 22 Mei2012

Penulis,

(Riza Pusparini)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Persembahan	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	5

BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Kinerja Keuangan	8
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	10
2.1.3 Pengangguran	12
2.1.4 Kemiskinan	13
2.1.5 Keterkaitan Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan	15
2.2 Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesis	16
2.2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	16
2.2.2 Penarikan Hipotesis	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1 Populasi	20
3.2 Data dan Sumber Data	21
3.3 Definisi Variabel	21
3.4 Model Penelitian	22
3.5 Pengukuran Variabel	27
3.5.1 Rasio Kinerja Keuangan	27
3.5.2 Pertumbuhan Ekonomi	29
3.5.3 Pengangguran	30
3.5.4 Kemiskinan	30
3.6 Metode Analisis Data	31
3.6.1 Alat Analisis	31
3.6.2 Hipotesis Operasional	31

3.6.3 Uji Asumsi Klasik	36
3.6.3.1 Uji Multikoleniaritas	36
3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas	36
3.6.3.3 Uji Autokorelasi	37
3.6.3.4 Pengujian Hipotesis	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Analisis Deskriptif	39
4.2 Analisis Statistik	43
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	43
4.2.1.1 Uji Multikolinearitas	43
4.2.1.2 Uji Heterokedastisitas	46
4.2.1.3 Uji Autokorelasi	48
4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda	50
4.2.3 Pengujian Hipotesis	58
4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	58
4.2.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	60
4.2.3.2.1 Pengujian Hipotesis 1	60
4.2.3.2.2 Pengujian Hipotesis 2	62
4.2.3.2.3 Pengujian Hipotesis 3	63
4.2.3.2.4 Pengujian Hipotesis 4	65
4.2.3.2.5 Pengujian Hipotesis 5	66
4.2.3.2.6 Pengujian Hipotesis 6	68
4.2.3.2.7 Pengujian Hipotesis 7	69
4.2.3.2.8 Pengujian Hipotesis 8	70

4.2.3.2.9 Pengujian Hipotesis 9	72
4.2.3.2.10 Pengujian Hipotesis 10	74
4.2.3.2.11 Pengujian Hipotesis 11	75
4.2.3.2.12 Pengujian Hipotesis 12	76
4.2.3.2.13 Pengujian Hipotesis 13	77
4.2.3.2.14 Pengujian Hipotesis 14	78
4.2.3.2.15 Pengujian Hipotesis 15	79
4.2.3.2.16 Pengujian Hipotesis 16	80
4.2.3.2.17 Pengujian Hipotesis 17	81
4.2.3.2.18 Pengujian Hipotesis 18	82
4.2.3.2.19 Pengujian Hipotesis 19	83
4.2.3.2.20 Pengujian Hipotesis 20	84
4.2.3.2.21 Pengujian Hipotesis 21	85
4.2.3.2.22 Pengujian Hipotesis 22	86
4.2.3.2.23 Pengujian Hipotesis 23	87
4.3 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.	90
BAB V PENUTUP	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Implikasi Penelitian	100
5.3 Keterbatasan Penelitian	101
5.4 Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Ringkasan hasil analisis deskriptif	38
Tabel 4.2 Nilai toleransi dan <i>variance inflation factor</i> dari Pertumbuhan Ekonomi sebagai <i>variable dependen</i>	42
Tabel 4.3 Nilai toleransi dan <i>variance inflation factor</i> dari Pengangguran atau Kemiskinan sebagai <i>variable dependen</i> ..	42
Tabel 4.4 Nilai toleransi dan <i>variance inflation factor</i> dari Pertumbuhan Ekonomi sebagai <i>variable dependen</i>	43
Tabel 4.5 Nilai toleransi dan <i>variance inflation factor</i> dari Pengangguran atau Kemiskinan sebagai <i>variable dependen</i> .	43
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi (1)	46
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi (2)	47
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi (3)	48
Tabel 4.9 Hasil uji regresi Pertumbuhan Ekonomi sebagai dependen	48
Tabel 4.10 Hasil uji regresi Pengangguran sebagai dependen	51
Tabel 4.11 Hasil uji regresi Kemiskinan sebagai dependen	54
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien determinasi (1)	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien determinasi (2)	57
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien determinasi (3)	57
Tabel 4.15 Hasil Uji Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen	61
Tabel 4.16 Hasil Uji Pengangguran sebagai variabel dependen	69
Tabel 4.17 Hasil Uji Kemiskinan sebagai variabel dependen	71

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Hipotesis Nol	87
--	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Model penelitian H ₀₁ sampai H ₀₉	23
Gambar 3.2 Model penelitian H ₁₀ sampai H ₀₁₆	24
Gambar 3.3 Model penelitian H ₀₁₇ sampai H ₀₂₃	25
Gambar 4.1 Uji heterokedastisitas 1	46
Gambar 4.2 Uji heterokedastisitas 2	47
Gambar 4.3 Uji heterokedastisitas 3	47
Gambar 4.4 Uji Validitas Koefisien Jalur	87

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2005-2006	105
Lampiran 2 Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2006-2009	107
Lampiran 3 Pendapatan Transfer Pusat +Provinsi+Pinjaman Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009.....	109
Lampiran 4 Realisasi Pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009	111
Lampiran 5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2009, Tanpa Migas (Juta Rupiah).....	113
Lampiran 6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009.....	115
Lampiran 7 Pengangguran (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009.....	116
Lampiran 8 Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009.....	117
Lampiran 9 Rasio Kemandirian (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009	118
Lampiran 10 Derajat Desentralisasi (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009	119
Lampiran 11 Rasio Ketergantungan Keuangan (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009	120

Lampiran 12 Rasio Efektifitas Pendapatan (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009	121
Lampiran 13 Rasio Efektifitas Belanja (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009	122
Lampiran 14 Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009.....	123
Lampiran 15 Rasio Pertumbuhan Belanja (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009.....	124
Lampiran 16 Hasil Analisis Deskriptif Variabel	126
Lampiran 17 Hasil Uji Asumsi Klasik	127
Lampiran 18 Hasil Regresi dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Dependen	132
Lampiran 19 Hasil Regresi dengan Pengangguran Sebagai Variabel Dependen	134
Lampiran 20 Hasil Regresi dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Dependen	136

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari rasio kinerja keuangan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan yang ada di suatu wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Objek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2006-2009. Dari seluruh jumlah populasi sebanyak 35 kabupaten/kota yang diperoleh dari BPS Yogyakarta dan Jawa Tengah, 35 kabupaten/kota telah melaporkan Laporan Realisasi APBD secara lengkap sehingga dapat dilakukan penelitian terhadap data tersebut. Penemuan empiris menunjukkan bahwa Rasio Kinerja Keuangan berupa Rasio Ketergantungan Keuangan memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu, Rasio Ketergantungan Keuangan juga berpengaruh terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi. Rasio Kinerja Keuangan yang lain yaitu, Rasio Kemandirian dan Derajat Desentralisasi gagal diuji, sedangkan Rasio Efektifitas Pendapatan, Rasio Efektifitas Belanja, Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Rasio Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta tidak berpengaruh terhadap Pengangguran dan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menyatakan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan juga Rasio Ketergantungan Keuangan berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci: Rasio Kinerja Keuangan, Rasio Ketergantungan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dimulainya era reformasi menjadi awal baru bagi pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota dengan dikeluarkannya UU No 22 dan UU No 25 tahun 1999 yang mengatur otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangan kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No 32 dan UU No 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintahan daerah (eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif). Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Dalam era ini, setiap kabupaten/kota dituntut untuk bisa mengatur daerahnya masing-masing tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat. Maju mundurnya sebuah daerah bergantung pada pemimpinnya, dan tak lepas juga dari bantuan pihak lain, yaitu investor. Kedatangan seorang investor tentu akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mengelola aset daerahnya. Namun, seorang investor juga tidak akan datang begitu saja. Banyak hal yang diperhatikan oleh investor sebelum mereka menanamkan

modalnya. Salah satu hal yang diperhatikan oleh investor adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu daerah mencerminkan kinerja pemerintah daerah tersebut selama satu tahun. Dari sini, investor bisa mengira-ira apakah daerah tersebut akan mendatangkan keuntungan baginya jika menanamkan modal.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari 2 aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Informasi yang dihasilkan dari pengukuran kinerja dapat digunakan untuk perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi.

Salah satu pengukuran kinerja adalah dengan analisis rasio kinerja pada laporan realisasi anggaran (LRA) pemerintah daerah yang dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari periode yang satu dengan yang lain. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasar data keuangan laporan realisasi anggaran, misalnya rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efektifitas, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dan masih banyak yang lainnya.

Baik buruknya kinerja dari suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan pada akhirnya juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan daerah tersebut. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.
3. Apakah kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio

pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi kalangan Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh rasio kinerja laporan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

3. Bagi Peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur pengetahuan yang dapat digunakan sebagai acuan/dasar bagi peneliti selanjutnya agar penelitian dapat dilakukan lebih baik dan sempurna dibidang Akuntansi Sektor Publik.

1.5 Sistematika Pembahasan

Terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi mengenai teori yang melandasi penelitian ini meliputi : kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, hasil penelitian terdahulu, hubungan antara variabel dalam model penelitian dan penarikan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : populasi dan sampel penelitian, sumber penelitian, definisi dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan

hasil penelitian yang telah diuraikan dan dianalisis hasil pengujian datanya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi, keterbatasan dan saran-saran yang dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas lebih mendalam mengenai teori-teori dan pendekatan-pendekatan yang menjelaskan pengertian kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan serta teori-teori yang menjelaskan hubungan dari ketiga variabel tersebut berupa hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dan sebagai acuan penyusunan hipotesis dan pemecahan masalah yang sedang diteliti.

2.1 Landasan Teori

Pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan (Mahmudi, 2007). Yang dimaksud akuntabilitas adalah para pemangku kekuasaan yang terpercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan padanya. Perlu adanya pertanggungjawaban baik lisan maupun secara tertulis kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan.

Laporan tertulis atau laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai fungsi utama yaitu untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Tidak semua pengguna mampu memahami dan menginterpretasi laporan keuangan

tersebut sehingga perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang banyak digunakan adalah dengan analisis rasio keuangan. Hasil perhitungan rasio-rasio keuangan akan diinterpretasikan, sehingga akan dapat dievaluasi kinerja keuangannya.

2.1.1 Kinerja Keuangan

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis organisasi (Bastian, 2001).

Kinerja merupakan pencapaian dari yang direncanakan oleh individu atau organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan bahwa individu atau organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Halim, 2001).

Dalam organisasi pemerintahan, anggaran merupakan dasar yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang paling utama. Berdasarkan hal tersebut pembaca LRA dapat membuat analisis mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio-rasio diantaranya adalah derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, rasio ketergantungan dan lainnya.

Namun pada penelitian ini yang digunakan yaitu rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja.

Rasio kemandirian merupakan rasio yang menunjukkan kemandirian keuangan suatu daerah. Rasio yang menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi, yaitu rasio ketergantungan keuangan. Derajat desentralisasi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau pengeluaran (belanja) sesuai dengan yang ditargetkan adalah rasio efektifitas.

Rasio pertumbuhan mengukur besarnya kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya. Analisis pertumbuhan pendapatan dan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing pendapatan dan belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon Kuznetz dalam Adit Agus Prastyo, 2010). Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan 3 hal pokok, antara lain :

1. Laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata (riil)
2. Persebaran atau distribusi angkatan kerja menurut sector kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya
3. Pola persebaran penduduk

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi

output totalnya atau *Gross Domestic Product* (GDP) dan sisi jumlah penduduknya (Boediono, 1998).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, yaitu :

1. jumlah penduduk,
2. jumlah stok barang modal,
3. luas tanah dan kekayaan alam, dan
4. tingkat teknologi yang digunakan.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Mudrajad Kuncoro dalam Adit Agus Prastyo, 2010).

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan keberhasilan pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya. Hasil yang diperoleh dapat berasal dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap (BPS). Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan eksens dari pertumbuhan ekonomi (Saragih dalam Havid Sularsono, 2011). Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi (BPS, 2004). Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa seharusnya perlu adanya prioritas yang lebih terhadap upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung.

2.1.3 Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mungkin mendapatkan pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (Putong, 2003).

Menurut Edwards (1974) dalam Ardi Hamzah (2007), bentuk-bentuk pengangguran adalah:

1. Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.
2. Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.
3. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
4. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

Pengangguran adalah meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistik).

2.1.4 Kemiskinan

Menurut *World Bank* dalam Ravi Dwi Wijayanto (2010), kemiskinan adalah "*the denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other*". Dari

definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin (Badan Pusat Statistik/BPS).

Menurut Nurkse (1953) dalam Ravi Dwi Wijayanto (2010), kemiskinan dibedakan menjadi 3, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang tergolong miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang tergolong miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

3. Kemiskinan Kultural

Seseorang tergolong miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

2.1.5 Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Rasio-rasio yang mengukur kinerja keuangan merupakan alat untuk menilai kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan berdasarkan pengelolaan keuangan. Rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas pengeluaran, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja terhadap APBD diharapkan mampu menghasilkan kebijakan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran serta sekaligus meminimalkan angka kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregardan Dwi Wahyuniarti dalam Adit Agus Prastyo, 2010).

Adanya pengelolaan secara ekonomis, efisien, efektif serta memiliki kemandirian maka suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesis

2.2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan rasio kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan pendapatan kemiskinan, sebelumnya sudah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu.

Ardi Hamzah (2007) mengungkapkan bahwa rasio kinerja berupa rasio kemandirian 1, rasio kemandirian 2 (derajat desentralisasi), dan rasio efisiensi berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektifitas tidak berpengaruh. Pengujian

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran, sedangkan terhadap kemiskinan berpengaruh negatif.

Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) meneliti tentang pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran dan kemiskinan. Dalam penelitiannya, digunakan rasio kemandirian 1, rasio kemandirian 2 (derajat desentralisasi), rasio kemandirian 3 (rasio ketergantungan keuangan), rasio efektifitas penerimaan, rasio efektifitas pengeluaran, rasio keserasian rutin, rasio keserasian pembangunan, rasio pertumbuhan penerimaan dan rasio pertumbuhan pengeluaran. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa rasio kemandirian 2 dan efektifitas penerimaan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio kinerja tidak dapat digunakan untuk memprediksi investasi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran tetapi tidak berpengaruh pada kemiskinan. Variabel investasi tidak berpengaruh pada kemiskinan dan pengangguran.

Hastuti dan Munarto (2005) dalam Ardi (2007) yang meneliti tentang kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kinerja keuangan Pemda kota Semarang sebelum dan sesudah otonomi daerah secara rata-rata menunjukkan perbedaan-perbedaan. Hampir semua rasio yang diukur menunjukkan perbedaan yang signifikan, kecuali pada rasio efektifitas dan *Debt Service Ratio* (DSCR).

Havid Sularso dan Yanuar Restianto (2011) menyimpulkan bahwa setelah otonomi daerah muncul indikator lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu kinerja keuangan daerah, selain tiga factor utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja.

Hadi Sasana (2009) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, dan juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap tenaga kerja terserap, serta berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan penelitian Liu dan Lin (2000) dalam Havid Sularsono dan Yanuar E. Restianto (2011), menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara belanja investasi pada infra struktur dengan desentralisasi.

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009) dalam Adit Agus Prastyo (2010), menemukan bahwaterdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkatkemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkatkemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhanekonomi untuk menurunkan tingkat

kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti dalam Adit Agus Prastyo (2010).

Tingginya aktivitas investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya akan memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan (Bappenas, 2003).

2.2.2 Penarikan Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto dalam Ravi Dwi Wijayanto, 2010).

Berdasar pemikiran yang bersifat teoritis dan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.

3. Rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan seluruh rangkaian penelitian yang akan dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang dirumuskan pada bab dua. Agar dapat membuktikan hipotesis tersebut, maka dibutuhkan data penelitian yang akan dijadikan sampel dalam penelitian. Selain itu, diperlukan juga alat ukur untuk digunakan sebagai pengidentifikasi dan pengukur semua variabel baik variabel terikat maupun variabel bebas.

3.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi keempat kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyertakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2005-2009 secara lengkap.
2. PDRB pada harga konstan 2000 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009.
3. Tingkat pengangguran kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009.
4. Tingkat kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009.

Jumlah keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten/kota pada tahun 2006-2009 telah memenuhi keempat kriteria di atas.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang didapat melalui laporan, catatan/sumber tertulis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Yogyakarta dan Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah Jawa Tengah tahun 2006-2009, PDRB harga konstan 2000 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009, tingkat pengangguran kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009 dan tingkat kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009.

3.3 Definisi Variabel

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hubungan kausal (*causal effect*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh suatu variabel dengan variabel lain yang meliputi fakta empiris rasio kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

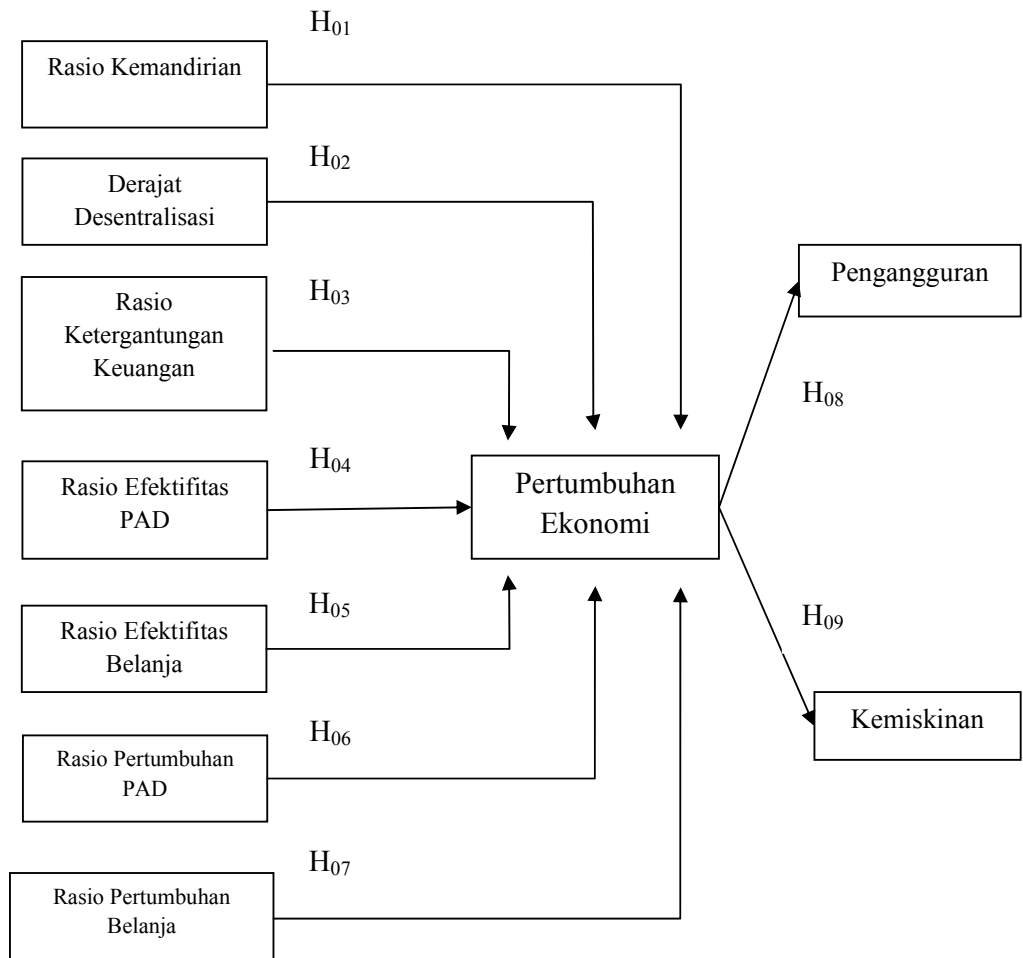
Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah rasio-rasio kinerja keuangan (rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja). Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi variabel bebas jika mempengaruhi pengangguran dan kemiskinan.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikatnya adalah pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat sebagai variabel terikat jika dipengaruhi oleh rasio kinerja keuangan (rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja).

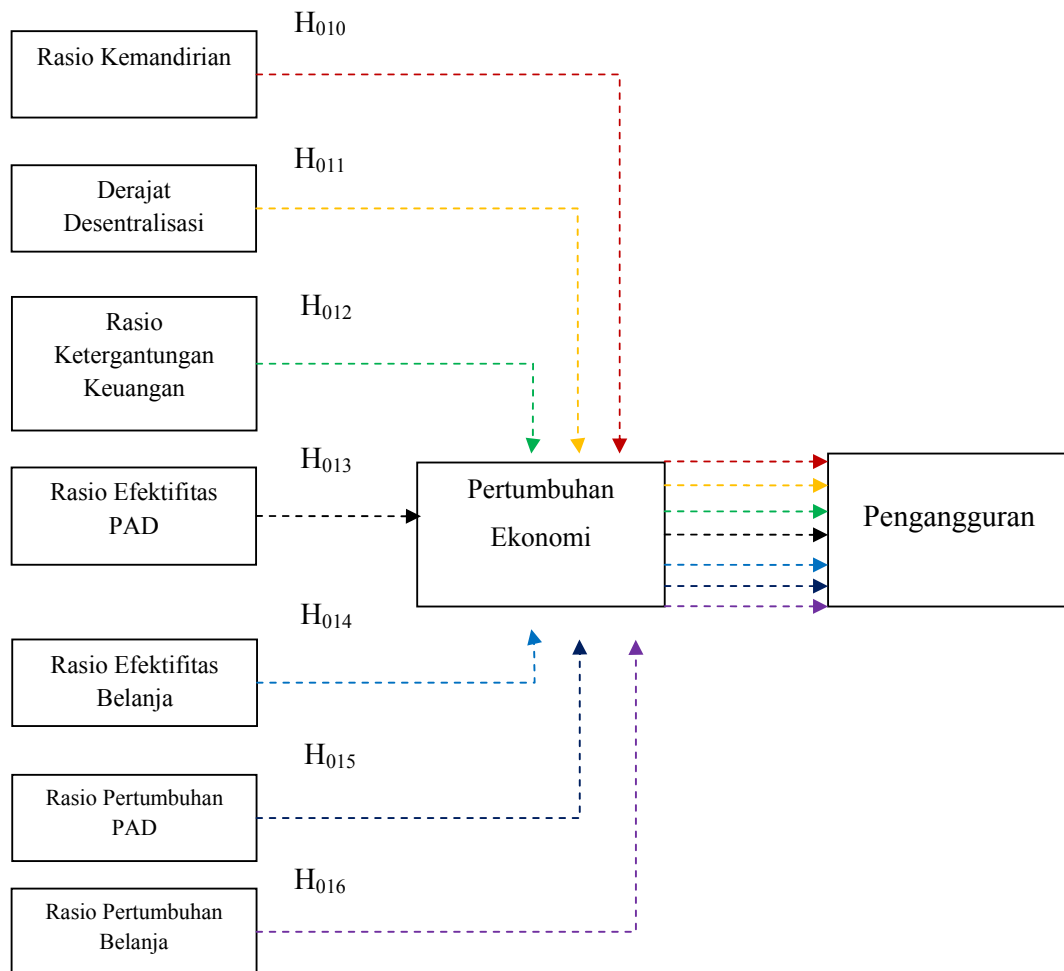
3.4 Model Penelitian

Model penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan adalah sebagai berikut :



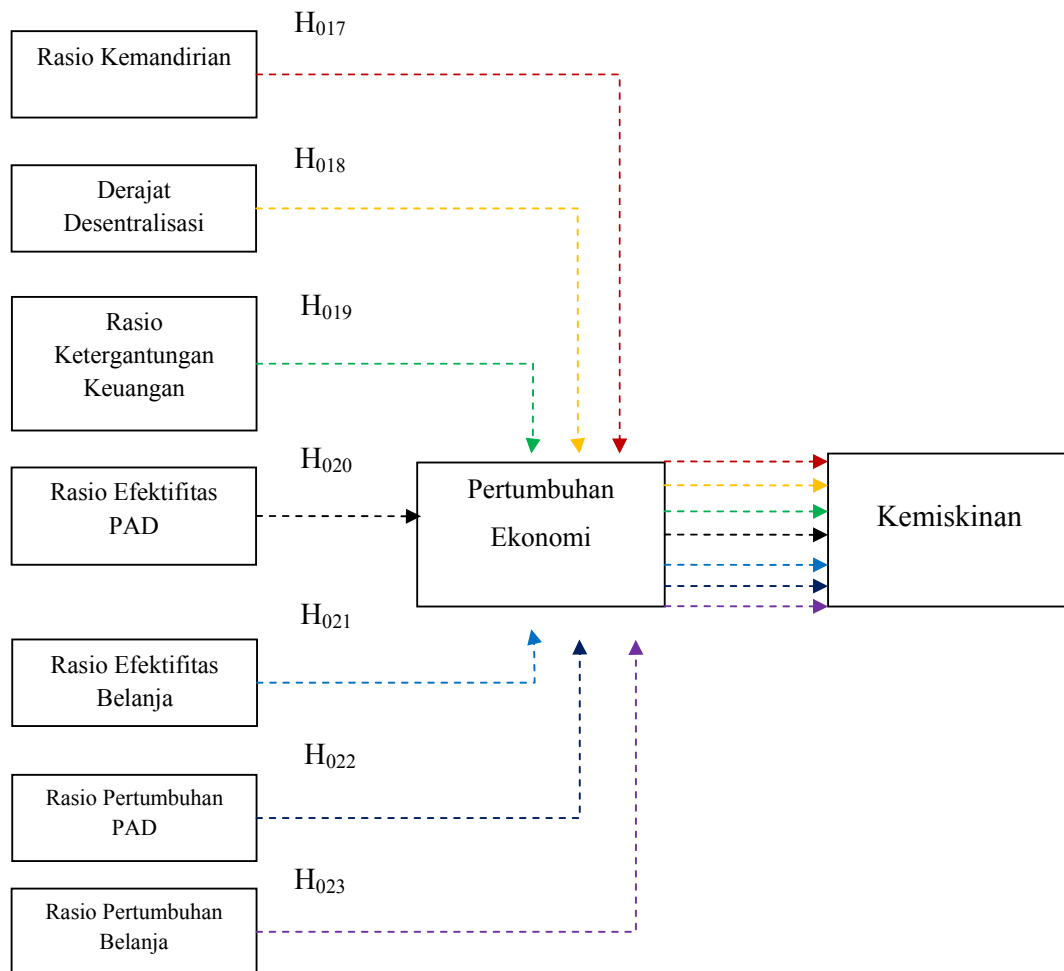
Gambar 3.1 Model Penelitian H₀₁ sampai H₀₉

Pada gambar 3.1 dapat dijelaskan, bahwa rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap pengangguran dan kemiskinan.



Gambar 3.2 Model Penelitian H₀₁₀ sampai H₀₁₆

Pada gambar 3.2 dapat dijelaskan, bahwa rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.



Gambar 3.3 Model Penelitian H₀₁₇ sampai H₀₂₃

Pada gambar 3.3 dapat dijelaskan, bahwa rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas PAD, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan model penelitian di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$1. PE = \alpha + \beta_1 K + \beta_2 DD + \beta_3 KK + \beta_4 EPN + \beta_5 EPG + \beta_6 PP + \beta_7 PB + e$$

$$2. PG = \alpha + \beta_1 K + \beta_2 DD + \beta_3 KK + \beta_4 EPN + \beta_5 EPG + \beta_6 PP + \beta_7 PB + \beta_8 PE + e$$

$$3. MS = \alpha + \beta_1 K + \beta_2 DD + \beta_3 KK + \beta_4 EPN + \beta_5 EPG + \beta_6 PP + \beta_7 PB + \beta_8 PE + e$$

Keterangan :

PE : Besarnya pertumbuhan ekonomi

PG : Besarnya tingkat pengangguran

MS : Besarnya tingkat kemiskinan

α : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8$: koefisien regresi

K : Rasio kemandirian

DD : Derajat desentralisasi

KK : Rasio ketergantungan keuangan

EPN : Rasio efektifitas PAD

EPG : Rasio efektifitas belanja

PP : Rasio pertumbuhan pendapatan

PB : Rasio pertumbuhan belanja

E : eror

Untuk menguji pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut maka digunakan metode analisis jalur (*Path*

Analysis). Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan secara teori (Ghozali, 2005).

3.5 Pengukuran Variabel

3.5.1 Rasio Kinerja Keuangan

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Kemandirian Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Ketergantungan Keuangan

Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Ketergantungan Keuangan

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektifitas PAD

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektifitas PAD diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

5. Rasio Efektifitas Belanja

Efektifitas belanja merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja yang telah ditargetkan sebelumnya. Rasio efektifitas belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Target Pengeluaran}}$$

6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Rasio pertumbuhan pendapatan dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$= \frac{\text{Pendapatan tahun } X - \text{Pendapatan tahun } (X - 1)}{\text{Pendapatan tahun } (X - 1)}$$

7. Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis rasio ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun, apakah rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Rasio pertumbuhan belanja diformulasikan sebagai berikut :

Rasio Pertumbuhan Belanja

$$= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran th } x - \text{Realisasi Pengeluaran tahun } (x - 1)}{\text{Realisasi Pengeluaran tahun } (x - 1)}$$

3.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada arti proses disini karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu negara, apakah sudah dikelola dengan benar. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang diterima oleh

setiap orang dalam perekonomian, maupun dilihat dari total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam suatu ekonomi suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan PDRB harga konstan pada tahun sekarang atau tahun sebelumnya. Adapun pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto pada periode t

PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto pada periode sebelum t

3.5.3 Pengangguran

Pengangguran diukur dari tingkat pengangguran yang ada di daerah yang diperoleh dari BPS. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja adalah termasuk dari orang yang dikatakan pengangguran. Tingkat pengangguran dalam penelitian ini adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

3.5.4 Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari

sisi pengeluaran. Tingkat kemiskinan dalam penelitian ini di dapat dari BPS yang menggunakan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) untuk menghitung tingkat kemiskinan di kabupaten/kota.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Alat Analisis

Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (multiple regression), yang diperoleh dari beberapa perhitungan pada tiap variabel.

3.6.2 Hipotesis Operasional

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, serta mengacu pada hipotesa teori, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan Hipotesa Nol (H_0) dan Hipotesa Alternatif (H_a), kemudian akan dilakukan pengujian atas hipotesa nol (H_0) untuk membuktikan apakah hipotesa nol (H_0) tersebut ditolak atau gagal ditolak. Hipotesa tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_{01} : \beta_1 = 0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antarasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antarasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_{02} : \beta_2 = 0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara derajat desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antaraderajat desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ho₃ : $\beta_3=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ha₃ : $\beta_3\neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antar rasio ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ho₄ : $\beta_4=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio efektifitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ha₄ : $\beta_4\neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio efektifitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ho₅ : $\beta_5=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antar rasio efektifitas belanja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ha₅ : $\beta_5\neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antar rasio efektifitas belanja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ho₆ : $\beta_6=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antar rasio pertumbuhan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ha₆ : $\beta_6\neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antar rasio pertumbuhan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ho₇ : $\beta_7=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antar rasio pertumbuhan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ha₇ : $\beta_7\neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ho₈ : $\beta_8=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.

$H_{a8}:\beta_8 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antarpertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.

$H_{o9}:\beta_9 = 0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antarpertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

$H_{a9}:\beta_9 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antarpertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

$H_{o10}:\beta_{10} = 0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio kemandirian terhadap pengangguran.

$H_{a10}:\beta_{10} \neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio kemandirian terhadap pengangguran.

$H_{o11}:\beta_{11} = 0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara derajat desentralisasi terhadap pengangguran.

$H_{a11}:\beta_{11} \neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara derajat desentralisasi terhadap pengangguran.

$H_{o12}:\beta_{12} = 0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan terhadap pengangguran.

$H_{a12}:\beta_{12} \neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan terhadap pengangguran.

$H_{o13}:\beta_{13} = 0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio efektifitas pendapatan terhadap pengangguran.

- Ha₁₃ : $\beta_{13}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio efektifitas pendapatan terhadap pengangguran.
- Ho₁₄ : $\beta_{14}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio efektifitas belanja terhadap pengangguran.
- Ha₁₄ : $\beta_{14}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan signifikan antara rasio efektifitas belanja terhadap pengangguran.
- Ho₁₅ : $\beta_{15}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan pendapatan terhadap pengangguran.
- Ha₁₅ : $\beta_{15}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan pendapatan terhadap pengangguran.
- Ho₁₆ : $\beta_{16}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan belanjaterhadap pengangguran
- Ha₁₆ : $\beta_{16}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan belanja terhadap pengangguran.
- Ho₁₇ : $\beta_{17}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio kemandirian terhadap kemiskinan.
- Ha₁₇ : $\beta_{17}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio kemandirian terhadap kemiskinan.
- Ho₁₈ : $\beta_{18}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara derajat desentralisasi terhadap kemiskinan.
- Ha₁₈ : $\beta_{18}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara derajat desentralisasi terhadap kemiskinan.

- Ho₁₉ : $\beta_{19}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan terhadap kemiskinan.
- Ha₁₉ : $\beta_{19}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan terhadap kemiskinan.
- Ho₂₀ : $\beta_{20}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio efektifitas pendapatan terhadap kemiskinan.
- Ha₂₀ : $\beta_{20}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antararasio efektifitas pendapatan terhadap kemiskinan.
- Ho₂₁ : $\beta_{21}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antararasio efektifitas belanja terhadap kemiskinan.
- Ha₂₁ : $\beta_{21}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antararasio efektifitas belanja terhadap kemiskinan.
- Ho₂₂ : $\beta_{22}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antararasio pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan.
- Ha₂₂ : $\beta_{22}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antararasio pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan.
- Ho₂₃ : $\beta_{23}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan belanja terhadap kemiskinan.
- Ha₂₃ : $\beta_{23}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antararasio pertumbuhan belanja terhadap kemiskinan.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan pada pengujian untuk mengetahui apakah ada pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan yang menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

3.6.3.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya hubungan variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya. Uji multikolinearitas dilakukan dengan syarat untuk melakukan analisis regresi berganda, serta untuk mengetahui ada tidaknya hubungan multikolinearitas dalam persamaan regresi. Dapat diketahui dengan menggunakan toleransi variabel (tolerance of variable) dan VIF (variable inflation factor). Apabila suatu variabel mempunyai nilai toleransi mendekati 1 dan VIF kurang dari 5, maka tidak ada indikasi multikolinearitas dalam suatu persamaan regresi linear berganda tersebut.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Perhitungan heteroskedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah model chart (diagram Scatterplot). Model regresi tidak terjadi heterokedastisitas jika data

menyebar di atas dan di bawah sumbu Y (0) dan tidak membentuk pola tertentu (Ghozali, 2005).

3.6.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara dua residual (kesalah pengganggu) pada periode t dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui adanya autokorelasi dapat menggunakan run test yang merupakan bagian dari statistic non-parametik. Jika antar residual terdapat korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% maka data tersebut random (acak) sehingga tidak terdapat hubungan korelasi.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Uji Signifikan F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Uji F ini digunakan untuk melihat signifikansi secara keseluruhan terhadap variabel dependen dengan tingkat keyakinan 95 % ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut :

a. $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $\text{sig } F > 0.05$, H_0 gagal ditolak.

b. $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $\text{sig } F < 0.05$, H_0 ditolak.

Hipotesis penelitian ini di uji menggunakan analisa regresi berganda. Pengujian hipotesis ditunjukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas keseluruhan terhadap variabel terikat. Pengujian dengan uji F biasa disebut *Analysis of Variance* (ANOVA).

Pengujian ANOVA dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tingkat signifikansi atau dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA $< \alpha 0,05$ maka H_0 gagal ditolak (berpengaruh) sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel ANOVA $> \alpha 0,05$, maka H_0 ditolak (tidak berpengaruh).

2. Uji Signifikansi nilai t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen. Dengan tingkat keyakinan 95 % ($\alpha = 5\%$). Dengan kriteria sebagai berikut :

a. Jika signifaikansi > 0.05 , H_0 gagal ditolak.

b. Jika signifikansi < 0.05 , H_0 ditolak.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan dan disajikan analisa terhadap data-data yang telah terkumpul. Setelah melakukan pengumpulan data yang berupa laporan realisasi APBD kabupaten/kota Jawa Tengah periode tahun 2006-2009, PDRB harga konstan 2000 kabupaten/kota Jawa Tengah periode tahun 2005-2009, tingkat pengangguran kabupaten/kota Jawa Tengah periode tahun 2006-2009, tingkat kemiskinan kabupaten/kota Jawa Tengah periode tahun 2006-2009 yang diperoleh dari BPS Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah, selanjutnya penelitian melakukan analisis data. Teknik analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif adalah analisis yang menjelaskan tentang gambaran data-data variabel penelitian yang terdiri dari nilai tertinggi, nilai terendah, dan standar deviasi. Sedangkan analisis statistik merupakan analisis yang dilakukan dengan pembuktian statistik untuk membuktikan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda.

4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi data yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut adalah ringkasan hasil analisis deskriptif dari rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas pengeluaran, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja,

pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Jumlah sampel pada penelitian ini menjadi 138 karena terdapat dua data dari 140 data yang mengalami outlier.

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
rasio kemandirian	138	3.82	28.04	8.7131	4.24308
derajat desentralisasi	138	4.39	21.40	8.2626	3.37997
rasio ketergantungan keuangan	138	67.33	95.61	87.7813	5.58674
rasio efektifitas pendapatan	138	80.43	261.32	122.2143	22.72682
rasio efektifitas belanj	138	28.64	552.87	117.9525	83.23725
rasio pertumbuhan pendapatan	138	.18	191.83	18.8644	20.21092
rasio pertumbuhan belanja	138	.25	63.90	21.3297	14.01864
pertumbuhan ekonomi	138	2.30	6.38	4.6217	.78473
pengangguran	138	3.10	15.74	7.5812	2.56756
kemiskinan	138	4.84	34.43	18.7698	6.72863
Valid N (listwise)	138				

(Sumber : Data olahan SPSS)

Dari tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Variabel Rasio Kemandirian mempunyai nilai terendah (minimum) sebesar 3,82 pada Kabupaten Brebes pada tahun 2007 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 28,4 pada Kota Semarang pada tahun 2009 dan standar deviasi sebesar 4,24488. Nilai rata-rata rasio kemandirian yang merupakan perbandingan hutang dalam negeri dengan hibah dan pinjaman hanya 8,07031 berarti tingkat kemandiriannya rendah.
- b. Variabel derajat desentralisasi mempunyai nilai terendah sebesar 4,39 pada Kabupaten Brebes pada tahun 2007 dan nilai tertinggi sebesar 21,40

pada Kota Semarang tahun 2007 dan standar deviasi 3.37997. Nilai rata-rata derajat desentralisasi yang merupakan perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah hanya 8.2626 berarti tingkat kemampuan penyelenggaraan desentralisasinya rendah.

- c. Variabel rasio ketergantungan keuangan daerah mempunyai nilai terendah sebesar 67,33 pada Kota Semarang tahun 2008 dan nilai tertinggi sebesar 95,61 pada Kota Brebes tahun 2007 dan standar deviasinya 5,59491. Nilai rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah yang merupakan perbandingan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah sebesar 87.7266 berarti pemerintah daerah mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
- d. Variabel rasio efektifitas pendapatan mempunyai nilai minimum sebesar 80,43 pada Kabupaten Klaten 2008 dan nilai maksimum sebesar 261,32 pada Kabupaten Kebumen tahun 2006 dan standar deviasi sebesar 22,69275. Nilai rata-rata rasio efektifitas pendapatan yang merupakan perbandingan realisasi PAD dengan target PAD sebesar 122.3280 berarti pemerintah daerah mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang ditargetkan.
- e. Variabel rasio efektifitas belanja mempunyai nilai minimum sebesar 28,64 pada Kabupaten Klaten 2008 dan nilai maksimum sebesar 552,87 pada Kabupaten Boyolali tahun 2007 dan standar deviasinya 83,23714. Nilai rata-rata rasio efektifitas belanja yang merupakan perbandingan realisasi

belanja dengan target belanja sebesar 117.9529 berarti pemerintah daerah mampu memobilisasi belanja sesuai yang ditargetkan.

- f. Variabel rasio pertumbuhan pendapatan mempunyai nilai minimum sebesar 0,18 pada Kabupaten Klaten tahun 2006 dan nilai maksimum sebesar 191,83 pada Kabupaten Kebumen tahun 2006 dan standar deviasinya sebesar 20,21990. Nilai rata-ratanya 18,8644.
- g. Variabel rasio pertumbuhan belanja mempunyai nilai minimum sebesar 0,25 pada Kabupaten Sragen tahun 2006 dan nilai maksimum sebesar 63,90 pada Kota Semarang tahun 2006 dan standar deviasinya sebesar 14,06338 serta nilai rata-rata sebesar 21,3297.
- h. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai minimum sebesar 2,30 pada Kabupaten Klaten tahun 2006 dan maksimum sebesar 6,38 pada Kota Semarang tahun 2007 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,78473. Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4.6217. Nilai tersebut dianggap relative kecil untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
- i. Variabel pengangguran mempunyai nilai minimum sebesar 3,10 pada Kabupaten Jepara tahun 2006 dan maksimum sebesar 15,74 pada Kota Tegal tahun 2008 dan standar deviasinya sebesar 2,56756. Nilai rata-rata tingkat pengangguran 7.5812. Nilai tersebut di anggap tinggi bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Dengan nilai pengangguran sebesar ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dengan munculnya gejala social, seperti tindak kriminal.

j. Variabel kemiskinan mempunyai nilai minimum sebesar 4,84 pada Kota Semarang tahun 2009 dan maksimum sebesar 34,43 pada Wonosobo tahun 2006 dan standar deviasinya sebesar 6,72863. Nilai rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 18.7698. nilai tersebut juga dianggap besar bagi negara berkembang. Oleh karena itu, prioritas utama yang harus dilakukan adalah mengatasi kemiskinan itu melalui program-program yang mengarah pada pengentasan kemiskinan.

4.2 Analisis Statistik

Analisis statistik merupakan analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Namun terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai bias. Adapun uji asumsi klasik yang akan dilakukan pada penelitian ini meliputi Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

4.2.1.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam sebuah model regresi berganda. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat multikolinearitas. Sebuah model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen secara kuat. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya problem multikolinearitas pada sebuah model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dimana nilai VIF harus dibawah nilai 10. Jika nilai VIF hasil regresi lebih besar dari 10 maka dapat dipastikan ada multikolinearitas diantara variabel bebas tersebut (Ghozali, 2006).

Tabel 4.2 Nilai toleransi dan *variance inflation factor* dari Pertumbuhan Ekonomi sebagai *variable dependen*

Nama Variabel	Toleransi	VIF
Rasio kemandirian	0.048	20.705
Derajat desentralisasi	0.056	18.003
Rasio ketergantungan keuangan	0.288	3.476
Rasio efektifitas pendapatan	0.590	1.695
Rasio efektifitas belanja	0.851	1.175
Rasio pertumbuhan pendapatan	0.561	1.782
Rasio pertumbuhan belanja	0.710	1.409

(Sumber : Data olahan SPSS)

Tabel 4.3 Nilai toleransi dan *variance inflation factor* dari Pengangguran atau Kemiskinan sebagai *variable dependen*

Nama Variabel	Toleransi	VIF
Rasio kemandirian	0.047	21.190
Derajat desentralisasi	0.053	18.780
Rasio ketergantungan keuangan	0.280	3.574
Rasio efektifitas pendapatan	0.581	1.720
Rasio efektifitas belanja	0.848	1.179
Rasio pertumbuhan pendapatan	0.557	1.796
Rasio pertumbuhan belanja	0.707	1.414
Pertumbuhan ekonomi	0.799	1.251

(Sumber : Data olahan SPSS)

Dari tabel 4.2 dan 4.3 dapat dilihat bahwa rasio kemandirian dan derajat desentralisasi mempunyai nilai toleransi kurang dari 0,10 dan VIF

lebih besar dari 10 sehingga dapat berarti dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara dua variabel bebas (independen) tersebut. Variabel rasio kemandirian dan derajat desentralisasi tersebut mengalami multikolinearitas sehingga untuk menghasilkan persamaan regresi yang tidak multikoleniaritas maka kedua variabel tersebut akan dihapus atau dihilangkan.

Hasil pengujian persamaan regresi yang baru adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Nilai toleransi dan *variance inflation factor* dari Pertumbuhan Ekonomi sebagai *variable dependen*

Nama Variabel	Toleransi	VIF
Rasio ketergantungan keuangan	0.804	1.244
Rasio efektifitas pendapatan	0.614	1.630
Rasio efektifitas belanja	0.898	1.114
Rasio pertumbuhan pendapatan	0.567	1.765
Rasio pertumbuhan belanja	0.805	1.242

(Sumber : Data olahan SPSS)

Tabel 4.5 Nilai toleransi dan *variance inflation factor* dari Pengangguran atau Kemiskinan sebagai *variable dependen*

Nama Variabel	Toleransi	VIF
Rasio ketergantungan keuangan	0.702	1.425
Rasio efektifitas pendapatan	0.609	1.643
Rasio efektifitas belanja	0.890	1.123
Rasio pertumbuhan pendapatan	0.563	1.777
Rasio pertumbuhan belanja	0.804	1.243
Pertumbuhan ekonomi	0.842	1.187

(Sumber : Data olahan SPSS)

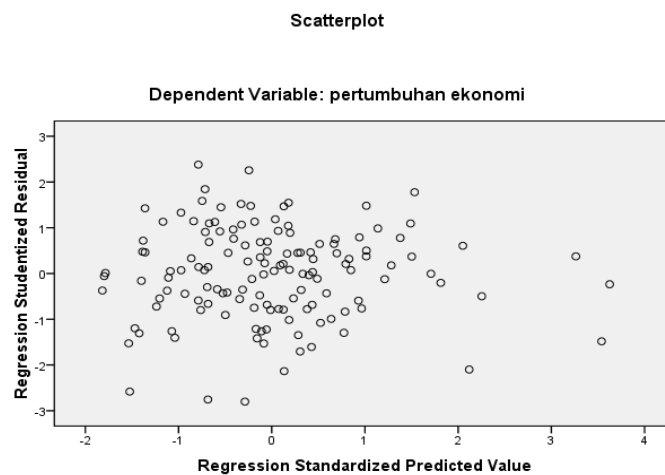
Berdasar tabel 4.4 dan 4.5 di atas, masing-masing variabel mempunyai nilai toleransi di atas 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal

ini dapat diartikan bahwa dalam model regresi yang baru tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi heterokedstisitas varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika dalam suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sedangkan, jika variansnya berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengalami heterokedastisitas atau tidak, dapat dilakukan dengan analisa grafik Scatterplot yang pada prinsipnya heterokedastisitas dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada grafik Scatterplot. Hasil dari uji heterokedastisitas pada tiap variabel adalah sebagai berikut :

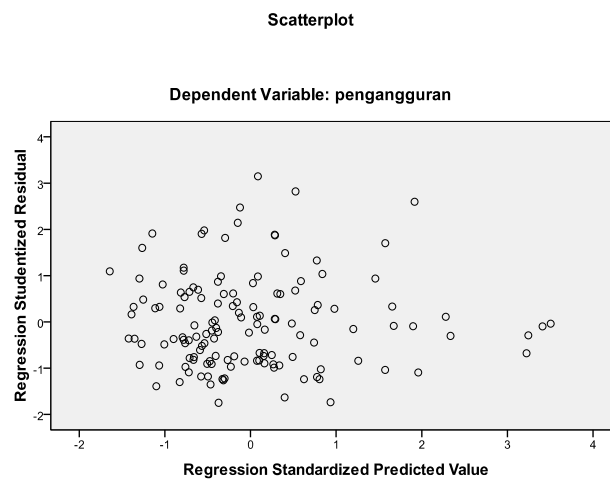
4.2.1.2.1 Pengujian Heteroskedastisitas Rasio Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.



Gambar 4.1 Uji heterokedastisitas (1)

Hasil dari pengujian heterokedastisitas pada variabel-variabel ini menunjukkan bahwa plot residual tersebar secara acak diatas dan dibawah titik 0 pada sumbu Y, maka dapat dinyatakan bahwa regresi tidak mengalami heterokedastisitas.

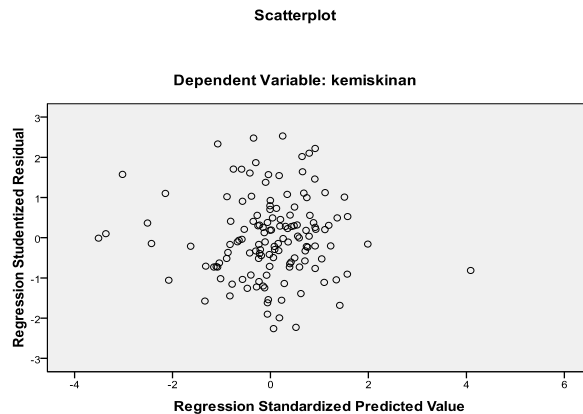
4.2.1.2.2 **Pengujian Heteroskedastisitas Rasio Kinerja Keuangan terhadap Pengangguran.**



Gambar 4.2 Uji heterokedastisitas (2)

Hasil dari pengujian heterokedastisitas pada variabel-variabel ini menunjukkan bahwa plot residual tersebar secara acak diatas dan dibawah titik 0 pada sumbu Y, maka dapat dinyatakan bahwa regresi tidak mengalami heterokedastisitas.

4.2.1.2.3 Pengujian Heteroskedastisitas Rasio Kinerja Keuangan terhadap Kemiskinan.



Gambar 4.3 Uji heterokedastisitas (3)

Hasil dari pengujian heterokedastisitas pada variabel-variabel ini menunjukkan bahwa plot residual tersebar secara acak diatas dan dibawah titik 0 pada sumbu Y, maka dapat dinyatakan bahwa regresi tidak mengalami heterokedastisitas.

4.2.1.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi berantai diantara faktor-faktor yang mengganggu secara berurutan. Untuk mengetahui adanya autokorelasi dapat menggunakan run test yang merupakan bagian dari statistic non-parametik. Jika antar residual terdapat korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Jika nilai probabilitasnya lebih dari 5% maka data tersebut random (acak) sehingga tidak terdapat hubungan korelasi.

4.2.1.3.1 Pengujian Autokorelasi Rasio Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 4.6 Uji autokorelasi (1)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.04124
Cases < Test Value	68
Cases >= Test Value	68
Total Cases	136
Number of Runs	58
Z	-1.894
Asymp. Sig. (2-tailed)	.058

a. Median

Hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai test adalah 0,04124 dengan probabilitas 0,058 signifikansi pada $\alpha=0,05$ yang berarti bahwa residual random atau tidak ada autokorelasi antar nilai residualnya.

4.2.1.3.2 Pengujian Autokorelasi Rasio Kinerja Keuangan terhadap Pengangguran.

Tabel 4.7 Uji autokorelasi (2)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.30222
Cases < Test Value	68
Cases >= Test Value	68
Total Cases	136
Number of Runs	53
Z	-2.754
Asymp. Sig. (2-tailed)	.058

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.30222
Cases < Test Value	68
Cases >= Test Value	68
Total Cases	136
Number of Runs	53
Z	-2.754
Asymp. Sig. (2-tailed)	.058

a. Median

Hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai test adalah -0,30222 dengan probabilitas 0,058 signifikansi pada $\alpha=0.05$ yang berarti bahwa residual random atau tidak ada autokorelasi antar nilai residualnya.

4.2.1.3.3 Pengujian Autokorelasi Rasio Kinerja Keuangan terhadap Pengangguran

Tabel 4.8 Uji autokorelasi (3)

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.44253
Cases < Test Value	68
Cases >= Test Value	68
Total Cases	136
Number of Runs	82
Z	2.238
Asymp. Sig. (2-tailed)	.058

a. Median

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai test adalah -0,44253 dengan probabilitas 0,058 signifikansi $\alpha=0.05$ yang berarti bahwa residual random atau tidak ada autokorelasi antar nilai residualnya.

4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian variabel rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi secara serentak dan parsial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9 Hasil uji regresi Pertumbuhan Ekonomi sebagai dependen
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	12.523	5	2.505	4.590	.001 ^a
Residual	70.927	130	.546		
Total	83.450	135			

a. Predictors: (Constant), rasio pertumbuhan belanja, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan

b. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.960	1.090		8.220	.000
rasio ketergantungan keuangan	-.054	.013	-.385	-4.280	.000
rasio efektifitas pendapatan	.003	.004	.101	.965	.337
rasio efektifitas belanj	.001	.001	.086	1.009	.315
rasio pertumbuhan pendapatan	-.004	.004	-.088	-.801	.424
rasio pertumbuhan belanja	-.002	.005	-.028	-.305	.761

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Berdasar tabel 4.9 di atas, secara serentak rasio ketergantungan daerah, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio

pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji F test sebesar 4.590 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang mana lebih kecil dari nilai $\alpha=5\%$.

Berdasarkan hasil pengujian regresi di atas diketahui dapat dibentuk sebuah persamaan sebagai berikut:

$$PE = 8.960 - 0.054KK + 0.003EP + 0.001EB - 0.004PP - 0.002PB$$

Nilai konstanta sebesar 8.960 ini berarti bahwa jika tidak ada variabel rasio ketergantungan daerah, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja maka variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 8.960 %. Variabel rasio ketergantungan daerah mempunyai koefisien regresi sebesar -0,054 berarti bahwa apabila variabel rasio ketergantungan meningkat 1% maka pertumbuhan ekonomi akan berkurang sebesar 0,054% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio efektifitas pendapatan mempunyai koefisien regresi sebesar 0.003 berarti bahwa apabila variabel rasio efektifitas pendapatan meningkat 1% maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat 0.003% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio efektifitas belanja mempunyai koefisien regresi sebesar 0.001 berarti bahwa apabila variabel rasio efektifitas belanja meningkat 1% maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0.001% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio pertumbuhan pendapatan mempunyai koefisien regresi sebesar -0.004 berarti bahwa variabel rasio

pertumbuhan pendapatan meningkat 1% maka pertumbuhan ekonomi akan berkurang sebesar 0.004% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio pertumbuhan belanja mempunyai koefisien regresi sebesar - 0.002 berarti bahwa variabel rasio pertumbuhan belanja meningkat 1% maka pertumbuhan ekonomi akan berkurang sebesar 0.002% dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil pengujian variabel rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran secara serentak dan parsial dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 4.10 Hasil uji regresi Pengangguran sebagai dependen

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	191.102	6	31.850	6.293	.000 ^a
Residual	652.859	129	5.061		
Total	843.961	135			

- a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	191.102	6	31.850	6.293	.000 ^a
Residual	652.859	129	5.061		
Total	843.961	135			

- a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan
- b. Dependent Variable: pengangguran

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.353	4.093		4.973	.000
rasio ketergantungan keuangan	-.205	.041	-.458	-4.985	.000
rasio efektifitas pendapatan	.030	.011	.276	2.736	.007
rasio efektifitas belanj	.003	.002	.108	1.312	.192
rasio pertumbuhan pendapatan	-.017	.013	-.130	-1.234	.220
rasio pertumbuhan belanja	.048	.015	.270	3.107	.002
pertumbuhan ekonomi	.083	.267	.026	.312	.755

- a. Dependent Variable: pengangguran

Berdasar tabel 4.10 di atas, secara rasio ketergantungan daerah, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan

pendapatan, rasio pertumbuhan belanja dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran . Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji F test sebesar 6.293 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang mana lebih kecil dari nilai $\alpha=5\%$.

Berdasarkan hasil pengujian regresi di atas diketahui dapat dibentuk sebuah persamaan sebagai berikut:

$$PG = 20.353 - 0.205KK + 0.030EP + 0.003EB - 0.017PP + 0.048PB + 0.083PE$$

Nilai konstanta sebesar 20.353 ini berarti bahwa jika tidak ada variabel rasio ketergantungan daerah, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja dan pertumbuhan ekonomi maka variabel pengangguran adalah sebesar 20.353 %. Variabel rasio ketergantungan daerah mempunyai koefisien regresi sebesar -0,205 berarti bahwa apabila variabel rasio ketergantungan meningkat 1% maka pengangguran akan berkurang sebesar 0,205% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio efektifitas pendapatan mempunyai koefisien regresi sebesar 0.030 berarti bahwa apabila variabel rasio efektifitas pendapatan meningkat 1% maka pengangguran akan meningkat 0.030% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio efektifitas belanja mempunyai koefisien regresi sebesar 0.003 berarti bahwa apabila variabel rasio efektifitas belanja meningkat 1% maka pengangguran akan meningkat sebesar 0.003% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio pertumbuhan

pendapatan mempunyai koefisien regresi sebesar -0.017 berarti bahwa variabel rasio pertumbuhan pendapatan meningkat 1% maka pengangguran akan berkurang sebesar 0.017% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio pertumbuhan belanja mempunyai koefisien regresi sebesar 0.048 berarti bahwa variabel rasio pertumbuhan belanja meningkat 1% maka pengangguran akan meningkat sebesar 0.048% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai koefisien regresi sebesar 0.083 berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka pengangguran akan berkurang sebesar 0.083% dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil pengujian variabel rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan secara serentak dan parsial dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 4.11 Hasil uji regresi kemiskinan sebagai dependen

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2155.597	6	359.266	12.128	.000 ^a
Residual	3821.210	129	29.622		
Total	5976.806	135			

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan

b. Dependent Variable: kemiskinan

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-50.003	9.901		-5.050	.000
rasio ketergantungan keuangan	.703	.100	.589	7.051	.000
rasio efektifitas pendapatan	.007	.027	.025	.268	.789
rasio efektifitas belanj	-.004	.006	-.047	-.632	.529
rasio pertumbuhan pendapatan	.076	.033	.224	2.341	.021
rasio pertumbuhan belanja	-.045	.037	-.095	-1.196	.234
pertumbuhan ekonomi	1.367	.646	.162	2.116	.036

a. Dependent Variable: kemiskinan

Berdasar tabel 4.11 di atas, secara serentak rasio ketergantungan daerah, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji F test sebesar 12.128 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang mana lebih kecil dari nilai $\alpha=5\%$.

Berdasarkan hasil pengujian regresi di atas diketahui dapat dibentuk sebuah persamaan sebagai berikut:

$$MS = -50.003 + 0.703KK + 0.007EP - 0.004EB + 0.076PP \\ - 0.045PB + 1.367PE$$

Nilai konstanta sebesar 4.757 ini berarti bahwa jika tidak ada variabel rasio ketergantungan daerah, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja dan pertumbuhan ekonomi maka variabel kemiskinan adalah

sebesar -50.003%. Variabel rasio ketergantungan daerah mempunyai koefisien regresi sebesar 0,703 berarti bahwa apabila variabel rasio ketergantungan meningkat 1% maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0,703% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio efektifitas pendapatan mempunyai koefisien regresi sebesar 0.007 berarti bahwa apabila variabel rasio efektifitas pendapatan meningkat 1% maka kemiskinan akan meningkat 0.007% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio efektifitas belanja mempunyai koefisien regresi sebesar -0.004 berarti bahwa apabila variabel rasio efektifitas belanja meningkat 1% maka kemiskinan akan berkurang sebesar 0.004% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio pertumbuhan pendapatan mempunyai koefisien regresi sebesar 0.076 berarti bahwa variabel rasio pertumbuhan pendapatan meningkat 1% maka kemiskinan akan meningkat sebesar 0.076% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel rasio pertumbuhan belanja mempunyai koefisien regresi sebesar -0.046 berarti bahwa variabel rasio pertumbuhan belanja meningkat 1% maka kemiskinan akan berkurang sebesar 0.046% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai koefisien regresi sebesar 1.367 berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka kemiskinan akan meningkat sebesar 1.367% dengan asumsi variabel lainnya konstan.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Uji koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (1)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.387 ^a	.150	.117	.73864

a. Predictors: (Constant), rasio pertumbuhan belanja, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan

c. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.476 ^a	.226	.190	2.24965

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan

b. Dependent Variable: pengangguran

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (3)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.601 ^a	.361	.331	5.44259

- a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, rasio efektifitas belanja, rasio efektifitas pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan
 b. Dependent Variable: kemiskinan

Dari tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa *Adjusted R Square* (R^2) adalah 0,117. Hal ini berarti bahwa 11,7% variabel pertumbuhan ekonomidapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja, sedangkan sisanya sebesar 88,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang dianalisis.

Dari tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa *Adjusted R Square* (R^2) adalah 0,190. Hal ini berarti bahwa 19,0% variabel penganggurandapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 81,0% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang dianalisis.

Dari tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa *Adjusted R Square* (R^2) adalah 0,331. Hal ini berarti bahwa 33,1% variabel kemiskinandapat

dijelaskan oleh variabel independen yaitu rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja, sedangkan sisanya sebesar 66,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang dianalisis.

4.2.3.2 Uji signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Untuk menguji hipotesis maka analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis berupa regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 17.0.

4.2.3.2.1 Pengujian Hipotesis 1

$H_{01} : \beta_1=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis Nol pertama (H_{01}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “Rasio Kemandirian tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi”.

Dari tabel 4.2, saat dilakukan uji multikolenialitas pada persamaan regresi yang memuat variabel rasio kemandirian ternyata terdapat korelasi yang cukup besar antar variabel bebasnya yang ditunjukkan dengan nilai toleransi 0,048 dan VIF 20,705 sehingga

variabel rasio kemandirian akan dihapus dan akan dibentuk persamaan regresi yang baru. Oleh karena itu H_{01} **gagal diuji**.

Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Ardi Hamzah (2007) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adanya perbedaan hasil penelitian ini mungkin disebabkan karena pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 hampir seluruh kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah masih mempunyai kemampuan yang rendah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi pada masing-masing kabupaten/kota sehingga rasio kemandirian dan derajat desentralisasi mempunyai hubungan multikolinearitas.

4.2.3.2.2 Pengujian Hipotesis 2

$H_{02} : \beta_2=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara derajat desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara derajat desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis Nol kedua (H_{02}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “Derajat desentralisasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi”.

Dari tabel 4.2, saat dilakukan uji multikolenialitas pada persamaan regresi yang memuat variabel derajat desentralisasi ternyata terdapat korelasi yang cukup besar antar variabel bebasnya yang ditunjukkan dengan nilai toleransi 0,056 dan VIF 18,003 sehingga variabel derajat desentralisasi akan dihapus dan akan dibentuk persamaan regresi yang baru. Oleh karena itu H_{02} **gagal diuji**.

Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) bahwa rasio kemandirian 2 (derajat desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi).

Adanya perbedaan hasil penelitian ini mungkin disebabkan karena pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 hampir seluruh kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah masih mempunyai kemampuan yang rendah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi pada masing-masing kabupaten/kota sehingga rasio kemandirian dan derajat desentralisasi mempunyai hubungan multikolinearitas.

4.2.3.2.3 Pengujian Hipotesis 3

$H_{03} : \beta_3=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_{a3} : \beta_3 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis Nol ketiga (H_{03}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “Rasio Ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi”.

Tabel 4.15 Hasil Uji Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Dependen

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.960	1.090		8.220	.000
rasio ketergantungan keuangan	-.054	.013	-.385	-4.280	.000
rasio efektifitas pendapatan	.003	.004	.101	.965	.337
rasio efektifitas belanj	.001	.001	.086	1.009	.315
rasio pertumbuhan pendapatan	-.004	.004	-.088	-.801	.424
rasio pertumbuhan belanja	-.002	.005	-.028	-.305	.761

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Berdasar tabel 4.15, hasil uji t test sebesar -4,280 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilainya lebih kecil dari nilai taraf signifikansinya sebesar 0,05. Jadi, rasio ketergantungan keuangan daerah **berpengaruh negatif secara langsung** terhadap Pertumbuhan Ekonomi sehingga H_{03} dalam penelitian ini **ditolak**.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi tinggi maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun. Penyebab hal tersebut mungkin dikarenakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi bukan berasal dari daerah itu sendiri sehingga dianggap daerah tersebut tidak mampu menghasilkan pendapatan sendiri dan dianggap daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat maupun provinsi. Apabila terjadi peningkatan pendapatan belum tentu akan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi tetapi malah dapat membuat pertumbuhan ekonomi turun. Hal tersebut dikarenakan dianggap bahwa daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tersebut tidak mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi jika bergantung hanya pada pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian 3 (rasio ketergantungan keuangan daerah) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan penelitian tersebut mungkin disebabkan karena pada tahun 2006 sampai 2009 pemerintah daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah kurang maksimal dalam mengelola/menggunakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun transfer pemerintah pusat/provinsi. Kurang maksimalnya pengelolaan atau

penggunaan pendapatan menyebabkan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat/provinsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah.

4.2.3.2.4 Pengujian Hipotesis 4

$H_{04} : \beta_4 = 0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio efektifitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_{a4} : \beta_4 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio efektifitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis Nol keempat (H_{04}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “Rasio Efektifitas Pendapatan tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi”.

Berdasar tabel 4.15, hasil uji t test sebesar 0,965 dan nilai signifikansi sebesar 0,337 dimana nilainya lebih besar dari nilai taraf signifikansinya sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa H_{04} **gagal ditolak**, sehingga Rasio Efektifitas Pendapatan **tidak berpengaruh secara langsung** terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa hanya rasio efektifitas pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki arah yang positif. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah (2007)

menyatakan bahwa rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan penelitian ini mungkin disebabkan oleh pengalokasian pendapatan yang dibelanjakan oleh masing-masing daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah pada tahun 2006 sampai 2009 bukan digunakan untuk membiayai program-program yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber-sumber di daerah. Walaupun pendapatan telah efektif/sesuai dengan yang dianggarkan, belum tentu dapat mempengaruhi pertumbuhan di daerah kabupaten/kota itu sendiri.

4.2.3.2.5 Pengujian Hipotesis 5

$H_{05} : \beta_5=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio efektifitas belanja terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_{a5} : \beta_5 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio efektifitas belanja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis Nol kelima (H_{05}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “Rasio Efektifitas Belanja tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi”.

Berdasar tabel 4.15, hasil uji t test sebesar 1,009 dan nilai signifikansi sebesar 0,315 dimana nilainya lebih besar dari nilai taraf signifikansinya sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa H_{05} **gagal ditolak**, sehingga Rasio Efektifitas

Belanja **tidak berpengaruh secara langsung** terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan penelitian ini disebabkan karena pemerintah daerah dari kabupaten atau kota di wilayah Jawa Tengah tahun 2006 sampai 2009 membelanjakan dananya dalam jumlah besar pada peralatan-peralatan yang mempunyai nilai ekonomi lebih dari satu tahun. Padahal belum tentu peralatan telah mengalami kerusakan sehingga terjadi pemborosan dalam melakukan belanja modal. Selain itu tingkat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah tiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti tingkat kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran yang ada pada suatu daerah.

4.2.3.2.6 Pengujian Hipotesis 6

$H_{06} : \beta_6 = 0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_{a_6} : \beta_6 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis Nol keenam (H_{o_6}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “Rasio Pertumbuhan Pendapatan tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi”.

Berdasar tabel 4.15, hasil uji t test sebesar -0,801 dan nilai signifikansi sebesar 0,424 dimana nilainya lebih besar dari nilai taraf signifikansinya sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa H_{o_6} **gagal ditolak**, sehingga Rasio Pertumbuhan Pendapatan **tidak berpengaruh secara langsung** terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kurang maksimal dalam mengelola pendapatan yang diterima pemerintah kabupaten atau kota Jawa Tengah sehingga pengalokasian pendapatan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga apabila terjadi penambahan pendapatan dari tahun ke tahun maka akan menjadi sia-sia saja sehingga tidak berpengaruh terhadap perekonomian perekonomian daerah itu sendiri.

4.2.3.2.7 Pengujian Hipotesis 7

$H_{07} : \beta_7 = 0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_{a7} : \beta_7 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis Nol ketujuh (H_{07}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “Rasio Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi”.

Berdasar tabel 4.15, hasil uji t test sebesar -0,305 dan nilai signifikansi sebesar 0,761 dimana nilainya lebih besar dari nilai taraf signifikansinya sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa H_{07} **gagal ditolak**, sehingga Rasio Pertumbuhan Belanja **tidak berpengaruh secara langsung** terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal yang tinggi guna meningkatkan pelayanan publik dari daerah masing-masing tidak menjamin adanya perbaikan perekonomian. Ada kemungkinan bahwa tiap tahunnya antara 2006 sampai 2009 pemerintah dalam membelanjakan dananya kurang mempertimbangkan perlu atau tidaknya dana tersebut dikeluarkan guna

meningkatkan pendapatan asli daerah. Bisa saja belanja yang dilakukan oleh pemda adalah belanja yang manfaatnya kurang dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sehingga apabila terjadi penambahan pengeluaran/belanja yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

4.2.3.2.8 Pengujian Hipotesis 8

$H_{08} : \beta_8=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.

$H_{a8} : \beta_8 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.

Hipotesis Nol kedelapan (H_{08}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengangguran”.

Tabel 4.16 Hasil Uji Pengangguran sebagai Variabel Dependen

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	20.353	4.093		4.973	.000
	rasio ketergantungan keuangan	-.205	.041	-.458	-4.985	.000
	rasio efektifitas pendapatan	.030	.011	.276	2.736	.007
	rasio efektifitas belanj	.003	.002	.108	1.312	.192
	rasio pertumbuhan pendapatan	-.017	.013	-.130	-1.234	.220
	rasio pertumbuhan belanja	.048	.015	.270	3.107	.002
	pertumbuhan ekonomi	.083	.267	.026	.312	.755

a. Dependent Variable: pengangguran

Berdasar tabel 4.16, hasil uji t test sebesar 0,312 dan nilai signifikansi sebesar 0,755 dimana nilainya lebih besar dari nilai taraf signifikansinya sebesar 0,05. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa H_0 **gagal ditolak**, sehingga pertumbuhan ekonomi **tidak berpengaruh secara langsung** terhadap pengangguran

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran dan arah koefisiennya positif. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah (2007) yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran.

Perbedaan penelitian ini mungkin dikarenakan pada tahun 2006 sampai 2009 tingkat pengangguran di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tinggi sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah hanya mengalami kenaikan yang relatif kecil sehingga tidak berpengaruh apapun terhadap tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Mungkin dikarenakan masih banyak factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, misalnya sumber daya, ilmu pengetahuan, budaya dan lain-lain.

4.2.3.2.9 Pengujian Hipotesis 9

$H_{09} : \beta_9=0$, tidak ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

$H_{a9} : \beta_9 \neq 0$, ada pengaruh secara langsung yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

Hipotesis Nol kesembilan (H_{09}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan”.

Tabel 4.17 Hasil Uji Kemiskinan sebagai Variabel Dependen

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-50.003	9.901		-5.050	.000
rasio ketergantungan keuangan	.703	.100	.589	7.051	.000
rasio efektifitas pendapatan	.007	.027	.025	.268	.789
rasio efektifitas belanj	-.004	.006	-.047	-.632	.529
rasio pertumbuhan pendapatan	.076	.033	.224	2.341	.021
rasio pertumbuhan belanja	-.045	.037	-.095	-1.196	.234
pertumbuhan ekonomi	1.367	.646	.162	2.116	.036

a. Dependent Variable: kemiskinan

Berdasar tabel 4.17, hasil uji t test sebesar 2,116 dan nilai signifikansi sebesar 0,036 dimana nilainya lebih kecil dari nilai taraf signifikansinya sebesar 0,05. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa H_{09} **ditolak** sehingga pertumbuhan ekonomi **berpengaruh secara langsung** terhadap kemiskinan dan arah koefisiennya positif.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah (2007) yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan dan arahnya negatif.

Adanya perbedaan penelitian ini mungkin disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah antara tahun 2006 sampai 2009 tidak stabil sehingga tidak mengalami peningkatan secara maksimum dari tahun ke tahun. Namun, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu mengatasi/menurunkan tingkat kemiskinan dari daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah pada tahun 2006-2009. Penyebab hal tersebut mungkin dikarenakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada di daerah Jawa Tengah tidak dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, hanya masyarakat tertentu saja yang dapat menggunakannya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah Jawa Tengah belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan, malahan akan menambah tingkat kemiskinan. Selain itu dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak di antara tahun 2006-

2009 ini menyebabkan harga bahan pokok makanan semakin tinggi dan itu pula mendorong kemiskinan semakin meningkat.

4.2.3.2.10 Pengujian Hipotesis 10

$H_{010}:\beta_{10}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio kemandirian terhadap pengangguran.

$H_{a10}:\beta_{10}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio kemandirian terhadap pengangguran.

Hipotesis Nol kesepuluh (H_{010}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio kemandirian tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran”.

Dari tabel 4.3, saat dilakukan uji multikolenialitas pada persamaan regresi yang memuat variabel rasio kemandirian ternyata terdapat korelasi yang cukup besar antar variabel bebasnya yang ditunjukkan dengan nilai toleransi 0,047 dan VIF 21,190 sehingga variabel rasio kemandirian akan dihapus dan akan dibentuk persamaan regresi yang baru. Oleh karena itu H_{010} **gagal diuji**.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah (2007) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.

4.2.3.2.11 Pengujian Hipotesis 11

$H_{011} : \beta_{11}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara derajat desentralisasi terhadap pengangguran.

$H_{a11} : \beta_{11} \neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara derajat desentralisasi terhadap pengangguran.

Hipotesis Nol kesebelas (H_{011}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “derajat desentralisasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran”.

Dari tabel 4.3, saat dilakukan uji multikolenialitas pada persamaan regresi yang memuat variabel derajat desentralisasi ternyata terdapat korelasi yang cukup besar antar variabel bebasnya yang ditunjukkan dengan nilai toleransi 0,053 dan VIF 18,780 sehingga variabel derajat desentralisasi akan dihapus dan akan dibentuk persamaan regresi yang baru. Oleh karena itu H_{011} **gagal diuji**.

4.2.3.2.12 Pengujian Hipotesis 12

$H_{012} : \beta_{12}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan terhadap pengangguran.

$H_{a12} : \beta_{12} \neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan terhadap pengangguran.

Hipotesis Nol keduabelas (H_{012}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio ketergantungan keuangan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran”.

Berdasar tabel 4,15 nilai signifikansi rasio ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga rasio ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berdasar tabel 4.16 nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran sebesar 0,755 lebih besar dari $\alpha=0,05$ sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan keuangan **tidak berpengaruh secara tidak langsung** terhadap pengangguran maka H_{012} **gagalditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan pendapat Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian 3 (rasio ketergantungan keuangan) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran.

Perbedaan penelitian ini dikarenakan mungkin pendapatan daerah baik yang berasal dari pusat maupun pendapatan asli daerah tidak akan mempengaruhi pengangguran jika tidak dikelola dengan benar.

4.2.3.2.13 Pengujian Hipotesis 13

$H_{013} : \beta_{13}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio efektifitas pendapatan terhadap pengangguran.

$H_{a13} : \beta_{13}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio efektifitas pendapatan terhadap pengangguran.

Hipotesis Nol ketigabelas (H_{013}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran”.

Berdasar tabel 4.15 nilai signifikansi rasio efektifitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,337 lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berdasar tabel 4.16 nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran sebesar 0,755 lebih besar dari $\alpha=0,05$ sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas pendapatan **tidak berpengaruh secara tidak langsung** terhadap pengangguran maka H_{013} **gagal ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah (2007). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang berpendapat bahwa rasio efektifitas 1

(rasio efektifitas pendapatan) berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.

Adanya perbedaan penelitian tersebut dikarenakan mungkin pada tahun 2006 sampai 2009 pemerintah daerah kabupaten/kota Jawa Tengah dalam penggunaan pendapatan telah sesuai dengan APBD dari masing-masing kabupaten/kota, akan tetapi pendapatan tersebut tidak digunakan secara proposional pada belanja aparatur ataupun belanja pelayanan publik.

4.2.3.2.14 Pengujian Hipotesis 14

$H_{014} : \beta_{14}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio efektifitas belanja terhadap pengangguran.

$H_{a14} : \beta_{14}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan signifikan antara rasio efektifitas belanja terhadap pengangguran.

Hipotesis Nol keempatbelas (H_{014}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran”.

Berdasar tabel 4,15 nilai signifikansi rasio efektifitas belanja terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,315 lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berdasar tabel 4.16 nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran sebesar 0,755 lebih besar dari $\alpha=0,05$ sehingga pertumbuhan ekonomi

tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas belanja **tidak berpengaruh secara tidak langsung** terhadap pengangguran sehingga H_{014} **gagal ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.

4.2.3.2.15 Pengujian Hipotesis 15

$H_{015} : \beta_{15} = 0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan pendapatan terhadap pengangguran.

$H_{a15} : \beta_{15} \neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan pendapatan terhadap pengangguran.

Hipotesis Nol kelimabelas (H_{015}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran”.

Berdasar tabel 4.15 nilai signifikansi rasio pertumbuhan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,424 lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasar tabel 4.16 nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran sebesar 0,755 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio

pertumbuhan pendapatan **tidak berpengaruh secara tidak langsung** terhadap pengangguran sehingga H_{015} **gagal ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.

4.2.3.2.16 Pengujian Hipotesis 16

$H_{016} : \beta_{16}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan belanjaterhadap pengangguran

$H_{a16} : \beta_{16}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan belanja terhadap pengangguran.

Hipotesis Nol keenambelas (H_{016}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran”.

Berdasar tabel 4.15 nilai signifikansi rasio pertumbuhan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,761 lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berdasar tabel 4.16 nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran sebesar 0,755 lebih besar dari $\alpha=0,05$ sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan belanja **tidak**

berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran maka H_{016} **gagal ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.

4.2.3.2.17 Pengujian Hipotesis 17

$H_{017}:\beta_{17}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio kemandirian terhadap kemiskinan.

$H_{a17}:\beta_{17}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio kemandirian terhadap kemiskinan.

Hipotesis Nol ketujuhbelas (H_{017}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio kemandirian tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan”.

Dari tabel 4.3, saat dilakukan uji multikolenialitas pada persamaan regresi yang memuat variabel rasio kemandirian ternyata terdapat korelasi yang cukup besar antar variabel bebasnya yang ditunjukkan dengan nilai toleransi 0,047 dan VIF 21,190 sehingga variabel rasio kemandirian akan dihapus dan akan dibentuk persamaan regresi yang baru. Oleh karena itu H_{017} **gagal diuji**.

4.2.3.2.18 Pengujian Hipotesis 18

$H_{018}:\beta_{18}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara derajat desentralisasi terhadap kemiskinan.

$H_{a18} : \beta_{18} \neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara derajat desentralisasi terhadap kemiskinan.

Hipotesis Nol kedelapanbelas (H_{018}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “derajat desentralisasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan”.

Dari tabel 4.3, saat dilakukan uji multikolenialitas pada persamaan regresi yang memuat variabel rasio kemandirian ternyata terdapat korelasi yang cukup besar antar variabel bebasnya yang ditunjukkan dengan nilai toleransi 0,053 dan VIF 18,780 sehingga variabel rasio kemandirian akan dihapus dan akan dibentuk persamaan regresi yang baru. Oleh karena itu H_{018} **gagal diuji**.

4.2.3.2.19 Pengujian Hipotesis 19

$H_{019} : \beta_{19} = 0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan terhadap kemiskinan.

$H_{a19} : \beta_{19} \neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan terhadap kemiskinan.

Hipotesis Nol kesembilanbelas (H_{019}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio ketergantungan keuangan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan”.

Berdasar tabel 4.15 nilai signifikansi rasio ketergantungan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga rasio ketergantungan

keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berdasar tabel 4.17 nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sebesar 0,035 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ sehingga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan keuangan **berpengaruh secara tidak langsung** terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga H_{019} **ditolak**.

Pada penelitian yang dilakukan penulis ini rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara langsung terhadap kemiskinan. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap kemiskinan sehingga H_{019} ditolak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mungkin disebabkan pada daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagian besar pendapatannya masih berasal dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi, sebagian besar pendapatan tersebut digunakan untuk pembangunan daerah kabupaten/kota itu sendiri sehingga telah

sedikit mengurangi kemiskinan yang terjadi walaupun melalui faktor-faktor lainnya.

4.2.3.2.20 Pengujian Hipotesis 20

$H_{020} : \beta_{20}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio efektifitas pendapatan terhadap kemiskinan.

$H_{a20} : \beta_{20}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio efektifitas pendapatan terhadap kemiskinan.

Hipotesis Nol kedua puluh (H_{020}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan”.

Berdasar tabel 4,15 nilai signifikansi rasio efektifitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,337 lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berdasar tabel 4.17 nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sebesar 0,035 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ sehingga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan maka H_{020} **gagal ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

4.2.3.2.21 Pengujian Hipotesis 21

$H_{021}:\beta_{21}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio efektifitas belanja terhadap kemiskinan.

$H_{a21}:\beta_{21}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio efektifitas belanja terhadap kemiskinan.

Hipotesis Nol kedua puluh satu (H_{021}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan”.

Berdasar tabel 4,15 nilai signifikansi rasio efektifitas belanja terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,315 lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berdasar tabel 4.17 nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sebesar 0,035 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ sehingga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas pendapatan **tidak berpengaruh secara tidak langsung** terhadap kemiskinan sehingga H_{021} **gagal ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

4.2.3.2.22 Pengujian Hipotesis 22

$H_{022} : \beta_{22}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan.

$H_{a22} : \beta_{22}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan.

Hipotesis Nol kedua puluh dua (H_{022}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan”.

Berdasar tabel 4.15 nilai signifikansi rasio pertumbuhan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,424 lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berdasar tabel 4.17 nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sebesar 0,035 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ sehingga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan **tidak berpengaruh secara tidak langsung** terhadap kemiskinan sehingga H_{022} **gagal ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan

pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

4.2.3.2.23 Pengujian Hipotesis 23

$H_{023} : \beta_{23}=0$, tidak ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan belanja terhadap kemiskinan.

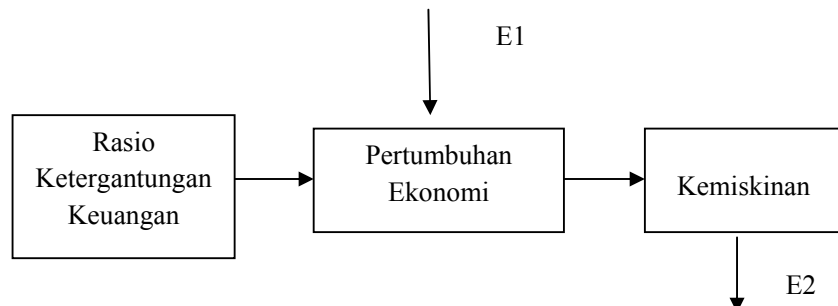
$H_{a23} : \beta_{23}\neq 0$, ada pengaruh secara tidak langsung yang signifikan antara rasio pertumbuhan belanja terhadap kemiskinan.

Hipotesis Nol kedupuluh tiga (H_{023}) dalam penelitian ini menyatakan bahwa “rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan”.

Berdasar tabel 4,15 nilai signifikansi rasio pertumbuhan belanja terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,761 lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05 sehingga rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berdasar tabel 4.17 nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sebesar 0,035 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ sehingga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan belanja **tidak berpengaruh secara tidak langsung** terhadap kemiskinan sehingga H_{023} **gagal ditolak**.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

Pada penelitian ini, indikator validitas model analisis jalurnya yaitu dengan menggunakan teori trimming. Berdasarkan teori *trimming* maka jalur-jalur non signifikan akan dibuang sehingga akan diperoleh model yang didukung oleh data empirik. Oleh karena itu, dihasilkan model penelitian dalam bentuk diagram jalur yang berdasar teori *trimming* adalah sebagai berikut :



Gambar 4.4 Uji Validitas Koefisien Jalur

Berdasarkan model di atas menunjukkan pengaruh tidak langsung rasio ketergantungan keuangan daerah ke kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar $-0,385 \times 0,162 = -0,06237$ atau sebesar 6,237%. Ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan sehingga hanya H_{019} saja yang berhasil ditolak untuk hubungan tidak langsung.

Dari hasil pengujian hipotesis di atas, maka ringkasan hasil pengujian hipotesis di atas sebagai berikut :

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Hipotesis Nol

Hipotesis	Keterangan
Ho ₁ : rasio kemandirian tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.	Gagal diuji
Ho ₂ :derajat desentralisasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.	Gagal diuji
Ho ₃ : rasio ketergantungan keuangan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.	ditolak
Ho ₄ : rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.	Gagal ditolak
Ho ₅ : rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.	Gagal ditolak
Ho ₆ : rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.	Gagal ditolak
Ho ₇ : rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.	Gagal ditolak
Ho ₈ : pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengangguran.	Gagal ditolak
Ho ₉ : pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan.	ditolak
Ho ₁₀ : rasio kemandirian tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.	Gagal diuji
Ho ₁₁ : rasio derajat desentralisasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran	Gagal diuji
Ho ₁₂ : rasio ketergantungan keuangan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.	Gagal ditolak
Ho ₁₃ : rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.	Gagal ditolak
Ho ₁₄ : rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap	Gagal ditolak

	pengangguran.	
Ho ₁₅ :	rasio pertumbuhan pendapat tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.	Gagal ditolak
Ho ₁₆ :	rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.	Gagal ditolak
Ho ₁₇ :	rasio kemandirian tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.	Gagal diuji
Ho ₁₈ :	derajat desentralisasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.	Gagal diuji
Ho ₁₉ :	rasio ketergantungan keuangan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.	ditolak
Ho ₂₀ :	rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.	Gagal ditolak
Ho ₂₁ :	rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.	Gagal ditolak
Ho ₂₂ :	rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.	Gagal ditolak
Ho ₂₃ :	rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.	Gagal ditolak

4.3 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya 3 hipotesis nol yang berhasil ditolak, yaitu H₀₃, H₀₉ dan H₀₁₉. Dari ketiga hipotesis tersebut maka terdapat 3 pengaruh, yaitu rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara langsung terhadap kemiskinan, serta rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

Namun ketiga hasil hipotesis tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah tahun 2009, dalam penelitian itu dinyatakan bahwa rasio kemandirian 3 (rasio ketergantungan keuangan) tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan, serta rasio kemandirian 3 (rasio ketergantungan keuangan) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Ardi Hamzah 2007 mendukung hasil penelitian penulis yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Namun arah koefisiennya berbeda, pada penelitian Ardi Hamzah tersebut arahnya negatif sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis arahnya positif. Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati dalam Adit Agus Prastyo (2010), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu juga

dengan penelitian yang dilakukan Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti dalam Adit Agus Prastyo (2010).

Perbedaan penelitian tersebut mungkin disebabkan karena pada tahun 2006 sampai 2009 pemerintah daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah kurang maksimal dalam mengelola/menggunakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun transfer pemerintah pusat/provinsi. Kurang maksimalnya pengelolaan/penggunaan pendapatan menyebabkan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat/provinsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah. Selain itu, tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Jawa Tengah sehingga tidak mampu mengatasi/menurunkan tingkat kemiskinan dari daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah pada tahun 2006-2009. Penyebab hal tersebut mungkin dikarenakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada di daerah Jawa Tengah tidak dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, hanya masyarakat tertentu saja yang dapat menggunakannya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah Jawa Tengah belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan, malahan akan menambah tingkat kemiskinan. Selain itu dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak di antara tahun 2006-2009 ini menyebabkan harga bahan pokok makanan semakin tinggi dan itu pula mendorong kemiskinan semakin meningkat.

Pada penelitian yang dilakukan penulis ini rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara langsung terhadap kemiskinan. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap kemiskinan sehingga H_{019} ditolak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu mungkin disebabkan pada daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagian besar pendapatannya masih berasal dari transfer pemerintah pusat maupun provinsi, sebagian besar pendapatan tersebut digunakan untuk pembangunan daerah kabupaten/kota itu sendiri sehingga telah sedikit mengurangi kemiskinan yang terjadi walaupun melalui faktor-faktor lainnya.

Terdapat 6 hipotesis yang gagal diuji dikarenakan adanya hubungan multikolonialitas pada variabel rasio kemandirian dan derajat desentralisasi. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan Ardi Hamzah 2007 dan Siti Nurhaeni serta Ardi Hamzah 2009 menyatakan bahwa rasio kemandirian 1 dan rasio kemandirian 2 (derajat desentralisasi) tidak mengalami multikolonialitas sehingga kedua variabel tersebut dapat diuji. Hasil penelitian Ardi Hamzah 2007 adalah menyatakan bahwa variabel rasio kemandirian 1 dan rasio kemandirian 2 (derajat desentralisasi) berpengaruh

positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pada penelitian Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah tahun 2009 hanya rasio kemandirian 1 yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini ada 16 hipotesis yang gagal ditolak yaitu H_{04} , H_{05} , H_{06} , H_{07} , H_{08} , H_{012} , H_{013} , H_{014} , H_{015} , H_{016} , H_{020} , H_{021} , H_{022} dan H_{023} .

Gagal ditolaknya H_{04} maka disimpulkan bahwa rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa hanya rasio efektifitas pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki arah yang positif. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah (2007) menyatakan bahwa rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gagal ditolaknya H_{05} maka disimpulkan bahwa rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gagal ditolaknya H_{06} maka disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa rasio

pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gagal ditolak H_0_7 dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gagal ditolak H_0_8 dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara langsung terhadap pengangguran. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran dan arah koefisiennya positif. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah (2007) yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran.

Gagal ditolak H_0_{12} dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan keuangan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian 3 (rasio ketergantungan keuangan) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran.

Gagal ditolak H_0_{13} dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap

pengangguran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah (2007). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Siti Nurhaeni dan Ardi Hamzah (2009) yang berpendapat bahwa rasio efektifitas 1 (rasio efektifitas pendapatan) berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.

Gagal ditolakny H_{014} dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.

Gagal ditolakny H_{015} dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatantidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.

Gagal ditolakny H_{016} dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengangguran.

Gagal ditolakny H_{020} dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni

(2009) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

Gagal ditolaknyaho₂₁ dapat disimpulkan bahwarasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio efektifitas belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

Gagal ditolaknyaho₂₂ dapat disimpulkan bahwarasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

Gagal ditolaknyaho₂₃ dapat disimpulkan bahwarasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi Hamzah dan Siti Nurhaeni (2009) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan.

Penyebab gagal ditolaknyahipotesis-hipotesis tersebut mungkin dikarenakan selain variabel-variabel tersebut di atas masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, misalnya sumber daya, teknologi, pendidikan serta budaya.

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan, implikasi, serta keterbatasan dan saran bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh dari rasio kinerja keuangan (rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja) terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan pada 35 kabupaten/kota yang telah menyerahkan laporan realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah pada tahun 2006-2009 yang berada di wilayah Jawa Tengah, namun setelah dilakukan perhitungan menggunakan program SPSS terdapat 2 kabupaten/kota yang mengalami data outlier sehingga harus dilakukan eliminasi data.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Kinerja keuangan berupa rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan

dan rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan, dan rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.
3. Kinerja keuangan berupa rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio efektifitas pendapatan, rasio efektifitas belanja, rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

5.2 Implikasi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini sendiri diharapkan dapat memberikan wacana/implikasi terhadap pemerintah daerah itu sendiri jika pemerintah ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah harus menggunakan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat/provinsi dengan tepat dan manfaatnya harus mampu menyentuh/bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, untuk

mengatasi kemiskinan pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai upaya selain hanya focus pada pertumbuhan ekonomi di daerah itu sendiri.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian mendatang. Beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian yang ingin dicapai, antara lain :

1. Penelitian ini hanya mencakup pengaruh rasio kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Masih ada faktor-faktor yang mungkin ditambahkan pada penelitian berikutnya.
2. Data yang diambil dalam penelitian ini hanya mencakup periode tahun 2006-2009.
3. Obyek penelitian terbatas di kabupaten/kota Jawa Tengah sehingga kesimpulan yang diambil kurang dapat digeneralisasikan untuk kabupaten/kota lainnya yang ada di Indonesia.

5.4 Saran

Dari beberapa keterbatasan yang dikemukakan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperbaiki keterbatasan tersebut antara lain:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel baru seperti indeks pembangunan manusia (IPM).
2. Pada penelitian selanjutnya peneliti dapat menambah periode tahun dengan jangka waktu yang lebih lama.

3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitiannya di kabupaten/kota pada provinsi yang berbeda di wilayah Indonesia.

LAMPIRAN 1

Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2009

(RibuRupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	66462073	78895457	82143538	102780342	120746426
2	Kab. Banyumas	63767247	84391270	96386445	107425765	120520362
3	Kab. Purbalingga	40755770	47694606	52727439	63795293	83177001
4	Kab. Banjarnegara	34210831	43900256	44876890	46528340	60636815
5	Kab. Kebumen	31707792	92533197	54260879	58599425	63016364
6	Kab. Purworejo	27888428	32813869	48237524	51174861	60814317
7	Kab. Wonosobo	23335686	30618482	36582594	38158244	46324944
8	Kab. Magelang	52858630	62226400	70074706	81203386	75582196
9	Kab. Boyolali	49816906	59307283	67437537	63733408	73985148
10	Kab. Klaten	33857398	33920000	42545342	49549622	53142865
11	Kab. Sukoharjo	30384475	44008081	42449899	41898319	48842529
12	Kab. Wonogiri	33378891	47864470	50329495	54129295	49946258
13	Kab. Karanganyar	34302566	46052120	56923919	64470676	66971683
14	Kab. Sragen	42848550	52019760	65257983	65561026	72681309
15	Kab. Grobogan	38336177	41921570	53458621	59922461	77079602
16	Kab. Blora	29432589	36637785	43392412	50203193	49696651
17	Kab. Rembang	28589410	39998290	42255838	51150558	56887895

Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (lanjutan)

18	Kab. Pati	57150613	66128698	69152362	80677766	90667623
19	Kab. Kudus	43696077	51311620	55181579	71520068	83045781
20	Kab. Jepara	50745471	54110690	64442492	70427234	71948111
21	Kab. Demak	19988132	33811888	34892079	43817065	49822371
22	Kab. Semarang	56511819	66625755	70860484	82942881	90389871
23	Kab. Temanggung	24018628	31643817	34884581	37773970	47363939
24	Kab. Kendal	38362165	63330009	75771963	71684588	76805714
25	Kab. Batang	23301041	31030140	30968198	41192714	44643602
26	Kab. Pekalongan	29079225	30803316	42341231	50136941	58468320
27	Kab. Pemasang	37394450	59457261	55835580	66737480	81819334
28	Kab. Tegal	48015429	53852887	63363141	59370632	70551139
29	Kab. Brebes	36401587	47995353	64365360	71896767	80275021
30	Kota Magelang	28643563	36533677	35814774	40549584	47704619
31	Kota Surakarta	66086576	78585750	89430978	102929502	101972319
32	Kota Salatiga	27784725	32449466	36192746	45149902	52053155
33	Kota Semarang	189773078	224822680	238237999	267914251	306112423
34	Kota Pekalongan	15192711	13937105	25745975	30098049	32238176
35	Kota Tegal	50342158	63725637	62259147	69567244	90840877

LAMPIRAN 2

Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009 (Ribu Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	710792100	905068818	506598032	1092960000
2	Kab. Banyumas	735769929	815719670	902467000	994245892
3	Kab. Purbalingga	501934039	555648593	668148000	697159487
4	Kab. Banjarnegara	516688682	582056378	648142378	685504757
5	Kab. Kebumen	638880889	735290566	818929197	863967627
6	Kab. Purworejo	517221913	603955247	674175651	712655394
7	Kab. Wonosobo	461378595	518544941	565156117	610151824
8	Kab. Magelang	632609401	727781393	789065058	830159254
9	Kab. Boyolali	587346957	652225853	745447221	818097003
10	Kab. Klaten	753788593	845330584	946523542	973128063
11	Kab. Sukoharjo	525763829	569130779	664283551	693939426
12	Kab. Wonogiri	620196929	700765410	777434000	826254044
13	Kab. Karanganyar	522066767	602775249	715680000	719200163
14	Kab. Sragen	567227830	695896990	767045000	749811001
15	Kab. Grobogan	601841901	672557582	756883980	779646490
16	Kab. Blora	484340785	611148967	704762000	714064690
17	Kab. Rembang	482547099	506465470	576004241	585125029
18	Kab. Pati	637166877	746391951	845815974	858470974
19	Kab. Kudus	513386176	668482258	689187620	822456353
20	Kab. Jepara	532798339	657115940	717327997	772921648

Total Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009 (lanjutan)

21	Kab. Demak	490300442	589062244	662393311	682660443
22	Kab. Semarang	543254652	634342329	712494254	745449752
23	Kab. Temanggung	442952527	503527892	565017935	578857738
24	Kab. Kendal	573539958	616571291	689094141	736016265
25	Kab. Batang	307662390	480948059	551363000	573555051
26	Kab. Pekalongan	459693767	551891316	643298840	654708053
27	Kab. Pemasang	560405810	628436200	696618775	711812361
28	Kab. Tegal	641951148	697656462	775590296	825563353
29	Kab. Brebes	707827184	777138704	864249000	965615798
30	Kota Magelang	271847015	310486189	351486934	375119071
31	Kota Surakarta	496167380	590132370	686976000	772783646
32	Kota Salatiga	260666114	290070758	376396813	348175682
33	Kota Semarang	940963475	1082784142	1180983641	1369670793
34	Kota Pekalongan	270572657	311053807	368905498	377278679
35	Kota Tegal	273881696	333002964	372947000	390649875

LAMPIRAN 3

Pendapatan Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009 (Ribu Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	655990300	841799267	460290465	992176000
2	Kab. Banyumas	677431021	732414700	813380000	892832034
3	Kab. Purbalingga	459412090	511878593	611925000	628293698
4	Kab. Banjarnegara	486113363	545531889	606293825	635905367
5	Kab. Kebumen	603470814	684539058	764989416	802837478
6	Kab. Purworejo	487650340	564056064	634585643	665174434
7	Kab. Wonosobo	436932909	493011590	533643577	565148472
8	Kab. Magelang	581300823	667393807	717788896	760604744
9	Kab. Boyolali	545019732	609024801	691660529	755309990
10	Kab. Klaten	717516805	804554860	895189107	907055017
11	Kab. Sukoharjo	496352567	531597451	621202242	648807426
12	Kab. Wonogiri	586544972	658030010	735905000	765311460
13	Kab. Karanganyar	485432096	554058918	661456000	655183056
14	Kab. Sragen	531161580	645306357	713032000	692360984
15	Kab. Grobogan	567043393	628869893	712236492	732755873
16	Kab. Blora	453662373	580416514	659385000	664064690
17	Kab. Rembang	451121032	455415810	528661894	528370396
18	Kab. Pati	580341944	690816175	788310974	787847382
19	Kab. Kudus	465728020	615755627	632746711	751051513

Pendapatan Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009 (lanjutan)

20	Kab. Jepara	480363242	603215707	661376934	700203972
21	Kab. Demak	467313584	559159627	630520473	640794769
22	Kab. Semarang	490096365	570538547	643006960	655261378
23	Kab. Temanggung	407053872	468541185	528320795	538864590
24	Kab. Kendal	516346190	564177438	630659395	673389200
25	Kab. Batang	288330480	455334433	521373000	537037488
26	Kab. Pekalongan	435056454	514773459	600764036	606575885
27	Kab. Pemalang	522397902	583388780	644040163	658153666
28	Kab. Tegal	594871751	639582661	722869963	758430400
29	Kab. Brebes	674453018	743017390	818430000	900534415
30	Kota Magelang	246106788	281766164	317497178	325745079
31	Kota Surakarta	421226460	503787670	591937000	666024227
32	Kota Salatiga	235242266	259646024	342095888	309184511
33	Kota Semarang	741565637	851043933	944101402	1110259704
34	Kota Pekalongan	254439802	291858801	347148211	354733759
35	Kota Tegal	217070073	274133379	313926000	325381076

LAMPIRAN 4

Realisasi Pengeluaran Kabupaten/Kota di PProvinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (Ribu Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	552924733	825875111	1067071256	1172492785	1167974674
2	Kab. Banyumas	532868531	719985020	870904666	973932843	1070009266
3	Kab. Purbalingga	354338890	433803970	556752030	707774473	745014151
4	Kab. Banjarnegara	379516631	506677930	610364335	716227899	735338765
5	Kab. Kebumen	414256928	618431278	895755398	859246349	946181526
6	Kab. Purworejo	354170858	463907479	580722935	691991235	758043855
7	Kab. Wonosobo	334135734	433928261	537828456	628220567	692359809
8	Kab. Magelang	440995769	622439030	806130719	853643213	850314467
9	Kab. Boyolali	427428312	530077206	738497658	793262108	810987628
10	Kab. Klaten	543766379	729406355	867096405	1000134799	981121677
11	Kab. Sukoharjo	329236580	486775929	633407937	717122974	710827126
12	Kab. Wonogiri	440860220	604211110	635198533	846335488	903594058
13	Kab. Karanganyar	388737613	493244814	619989535	772834364	786268341
14	Kab. Sragen	403874750	592406430	701934395	805789213	807787741
15	Kab. Grobogan	451992263	582165712	739694326	871274392	813339697
16	Kab. Blora	370991823	448504874	568153118	769142355	804635000
17	Kab. Rembang	278421580	411063290	539616246	592524623	587394807
18	Kab. Pati	453304272	575823630	747390719	900119172	957336803
19	Kab. Kudus	427957954	476286478	603786452	726323425	869172775

Realisasi Pengeluaran Kabupaten/Kota di PRowinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (lanjutan)

20	Kab. Jepara	401240564	539720214	671017548	744074361	753184661
21	Kab. Demak	360640551	491235757	627766263	691464003	748921779
22	Kab. Semarang	373595743	531147398	652250825	794396381	789795015
23	Kab. Temanggung	269011106	423686683	503744676	611340692	606950607
24	Kab. Kendal	367293213	552963071	597617551	756328308	786579283
25	Kab. Batang	309373481	404498739	502074689	578573194	581860419
26	Kab. Pekalongan	337490914	446989524	541217604	672945318	689683536
27	Kab. Pemasang	390986697	583144513	651124067	767167956	843963217
28	Kab. Tegal	436224114	605018460	703315829	872732362	847808763
29	Kab. Brebes	466160816	633700300	847543970	973243124	926528772
30	Kota Magelang	172103665	242474775	317029441	386124525	412723983
31	Kota Surakarta	340095169	470560730	588297505	760080852	747265481
32	Kota Salatiga	172229939	225666718	253773748	368393972	432656545
33	Kota Semarang	565716474	927224311	1130846244	1325301609	1505502336
34	Kota Pekalongan	179445904	259967477	314877859	397148649	384212291
35	Kota Tegal	247588421	291812156	333581748	395200044	458620880

LAMPIRAN 5

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2009, Tanpa Migas (Juta Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	10145144.43	10623929.25	11140846.35	11689092.90	12303308.34
2	Kab. Banyumas	3598399.16	3759547.61	3958645.95	4171468.95	4400542.23
3	Kab. Purbalingga	1921653.92	2018808.10	2143746.23	2257392.77	2384014.04
4	Kab. Banjarnegara	2277617.86	2376694.59	2495785.82	2619992.61	2753939.73
5	Kab. Kebumen	2364385.90	2460816.97	2571062.88	2721254.09	2828395.07
6	Kab. Purworejo	2321543.04	2442927.30	2591535.38	2737087.13	2872723.79
7	Kab. Wonosobo	1570347.69	1621132.33	1679149.65	1741148.31	1811092.68
8	Kab. Magelang	3245978.81	3405369.22	3582647.65	3761388.59	3938764.68
9	Kab. Boyolali	3456062.13	3600897.97	3748102.11	3889372.86	4100520.26
10	Kab. Klaten	4158205.16	4253788.00	4394688.02	4567200.96	4761018.67
11	Kab. Sukoharjo	3941788.46	4120437.35	4330992.90	4540751.53	4756902.50
12	Kab. Wonogiri	2429869.63	2528851.78	2657068.89	2770435.78	2901577.44
13	Kab. Karanganyar	4188330.48	4401301.73	4654054.50	4900690.40	5076549.87
14	Kab. Sragen	2322239.43	2442570.43	2582492.48	2729450.32	2893427.19
15	Kab. Grobogan	2579283.26	2682467.18	2799700.55	2948793.80	3097093.25
16	Kab. Blora	1678274.29	1742962.60	1811864.01	1913763.35	2010908.67
17	Kab. Rembang	1825560.59	1926563.25	1999951.16	2093412.59	2186736.49
18	Kab. Pati	3609798.36	3770330.52	3966062.17	4162082.37	4357144.04

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2009, Tanpa Migas (Juta Rupiah) (lanjutan)

19	Kab. Kudus	10647407.99	10911733.76	11242693.32	11683819.73	12125681.79
20	Kab. Jepara	3411159.47	3554051.11	3722677.82	3889988.85	4085438.36
21	Kab. Demak	2471258.72	2570573.50	2677366.77	2787524.02	2901151.51
22	Kab. Semarang	4481358.29	4652041.80	4871444.25	5079003.74	5300723.41
23	Kab. Temanggung	1994172.89	2060140.23	2143221.22	2219155.63	2309841.53
24	Kab. Kendal	4277354.27	4433799.54	4625437.33	4822465.28	5020087.37
25	Kab. Batang	1972776.85	2022301.42	2092973.93	2169854.55	2250616.82
26	Kab. Pekalongan	2600855.96	2710378.32	2834685.01	2970214.98	3098072.64
27	Kab. Pemalang	2762252.29	2865095.20	2993296.76	3142808.70	3293056.25
28	Kab. Tegal	2809340.19	2955121.91	3120395.64	3286263.44	3466785.57
29	Kab. Brebes	4346424.44	4551196.99	4769145.46	4998528.19	5247897.41
30	Kota Magelang	878160.76	899564.99	946063.73	993835.20	1044650.24
31	Kota Surakarta	3858169.65	4067529.95	4304287.37	4549342.95	4817877.63
32	Kota Salatiga	722063.94	752149.22	792680.44	832154.88	869452.99
33	Kota Semarang	16194264.63	17118705.29	18142639.97	19156814.29	20057621.85
34	Kota Pekalongan	1701324.24	1753405.74	1820001.21	1887853.70	1966751.15
35	Kota Tegal	1002821.99	1054499.45	1109438.21	1166587.87	1225424.73

LAMPIRAN 6

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009(%)

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	4.72	4.87	4.92	5.25
2	Kab. Banyumas	4.48	5.30	5.38	5.49
3	Kab. Purbalingga	5.06	6.19	5.30	5.61
4	Kab. Banjarnegara	4.35	5.01	4.98	5.11
5	Kab. Kebumen	4.08	4.48	5.84	3.94
6	Kab. Purworejo	5.23	6.08	5.62	4.96
7	Kab. Wonosobo	3.23	3.58	3.69	4.02
8	Kab. Magelang	4.91	5.21	4.99	4.72
9	Kab. Boyolali	4.19	4.09	3.77	5.43
10	Kab. Klaten	2.30	3.31	3.93	4.24
11	Kab. Sukoharjo	4.53	5.11	4.84	4.76
12	Kab. Wonogiri	4.07	5.07	4.27	4.73
13	Kab. Karanganyar	5.08	5.74	5.30	3.59
14	Kab. Sragen	5.18	5.73	5.69	6.01
15	Kab. Grobogan	4.00	4.37	5.33	5.03
16	Kab. Blora	3.85	3.95	5.62	5.08
17	Kab. Rembang	5.53	3.81	4.67	4.46
18	Kab. Pati	4.45	5.19	4.94	4.69
19	Kab. Kudus	2.48	3.03	3.92	3.78
20	Kab. Jepara	4.19	4.74	4.49	5.02
21	Kab. Demak	4.02	4.15	4.11	4.08
22	Kab. Semarang	3.81	4.72	4.26	4.37
23	Kab. Temanggung	3.31	4.03	3.54	4.09
24	Kab. Kendal	3.66	4.32	4.26	4.10
25	Kab. Batang	2.51	3.49	3.67	3.72
26	Kab. Pekalongan	4.21	4.59	4.78	4.30
27	Kab. Pemasang	3.72	4.47	4.99	4.78
28	Kab. Tegal	5.19	5.59	5.32	5.49
29	Kab. Brebes	4.71	4.79	4.81	4.99
30	Kota Magelang	2.44	5.17	5.05	5.11
31	Kota Surakarta	5.43	5.82	5.69	5.90
32	Kota Salatiga	4.17	5.39	4.98	4.48
33	Kota Semarang	5.71	5.98	5.59	4.70
34	Kota Pekalongan	3.06	3.80	3.73	4.18
35	Kota Tegal	5.15	5.21	5.15	5.04

LAMPIRAN 7

Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009(%)

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	10.27	11.48	10.16	11.45
2	Kab. Banyumas	8.36	8.07	8.05	8.05
3	Kab. Purbalingga	4.45	7.56	7.08	4.66
4	Kab. Banjarnegara	6.82	6.39	4.91	5.07
5	Kab. Kebumen	9.61	7.18	6.12	8.12
6	Kab. Purworejo	4.19	5.43	4.32	4.94
7	Kab. Wonosobo	3.11	5.68	5.50	3.62
8	Kab. Magelang	6.15	6.26	5.06	4.95
9	Kab. Boyolali	4.27	7.25	5.90	5.51
10	Kab. Klaten	8.14	8.19	7.26	6.36
11	Kab. Sukoharjo	8.01	9.45	8.12	8.28
12	Kab. Wonogiri	5.07	5.20	5.73	5.03
13	Kab. Karanganyar	5.79	6.63	5.70	8.26
14	Kab. Sragen	4.31	6.21	5.64	5.78
15	Kab. Grobogan	5.30	5.83	6.19	6.07
16	Kab. Blora	3.94	3.92	5.71	6.99
17	Kab. Rembang	7.59	5.70	5.89	5.64
18	Kab. Pati	8.50	8.38	9.36	7.68
19	Kab. Kudus	5.14	7.03	6.15	7.36
20	Kab. Jepara	3.10	5.78	5.76	4.40
21	Kab. Demak	6.66	7.04	6.64	5.72
22	Kab. Semarang	5.61	9.36	7.39	7.88
23	Kab. Temanggung	4.46	6.77	4.90	4.24
24	Kab. Kendal	8.05	5.42	6.39	5.64
25	Kab. Batang	9.33	8.13	8.77	7.11
26	Kab. Pekalongan	7.31	7.93	7.38	4.18
27	Kab. Pemasang	11.44	8.53	9.97	12.26
28	Kab. Tegal	9.14	9.38	9.56	9.24
29	Kab. Brebes	11.53	9.01	7.92	9.42
30	Kota Magelang	9.16	12.37	12.28	14.95
31	Kota Surakarta	9.32	9.31	9.57	10.44
32	Kota Salatiga	13.20	11.35	11.27	10.95
33	Kota Semarang	9.80	11.39	11.51	10.66
34	Kota Pekalongan	10.57	9.64	9.75	8.61
35	Kota Tegal	8.60	14.75	13.32	15.74

LAMPIRAN 8

Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009(%)

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	24.93	22.59	21.40	19.88
2	Kab. Banyumas	24.44	22.46	22.93	21.52
3	Kab. Purbalingga	32.38	30.24	27.12	24.97
4	Kab. Banjarnegara	29.40	27.18	23.34	21.36
5	Kab. Kebumen	32.49	30.25	27.87	25.73
6	Kab. Purworejo	22.75	20.49	18.22	17.02
7	Kab. Wonosobo	34.43	32.29	27.72	25.91
8	Kab. Magelang	17.36	17.37	16.49	15.19
9	Kab. Boyolali	20.00	18.06	17.08	15.96
10	Kab. Klaten	22.99	22.27	21.72	19.68
11	Kab. Sukoharjo	15.63	14.02	12.13	11.51
12	Kab. Wonogiri	27.01	24.44	20.71	19.08
13	Kab. Karanganyar	18.69	17.39	15.68	14.73
14	Kab. Sragen	23.72	21.24	20.83	19.70
15	Kab. Grobogan	27.60	25.14	19.84	18.68
16	Kab. Blora	23.95	21.46	18.79	17.70
17	Kab. Rembang	33.20	30.71	27.21	25.86
18	Kab. Pati	22.14	19.79	17.90	15.92
19	Kab. Kudus	12.05	10.73	12.58	10.80
20	Kab. Jepara	11.75	10.44	11.05	9.60
21	Kab. Demak	26.03	23.50	21.24	19.70
22	Kab. Semarang	13.62	12.34	11.37	10.66
23	Kab. Temanggung	16.62	16.55	16.39	15.05
24	Kab. Kendal	21.59	20.70	17.87	16.02
25	Kab. Batang	19.99	20.79	18.08	16.61
26	Kab. Pekalongan	22.80	20.31	19.52	17.93
27	Kab. Pemasang	25.30	22.79	23.92	22.17
28	Kab. Tegal	20.71	18.50	15.78	13.98
29	Kab. Brebes	30.36	27.93	25.98	24.39
30	Kota Magelang	11.19	10.01	11.16	10.11
31	Kota Surakarta	15.21	13.64	16.13	14.99
32	Kota Salatiga	8.90	9.01	8.47	7.82
33	Kota Semarang	5.33	5.26	6.00	4.84
34	Kota Pekalongan	7.38	6.62	10.29	8.56
35	Kota Tegal	10.40	9.36	11.28	9.88

LAMPIRAN 9

Rasio Kemandirian (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	8.35	7.52	10.06	10.16
2	Kab. Banyumas	8.61	11.37	10.95	11.36
3	Kab. Purbalingga	9.26	8.55	9.19	10.96
4	Kab. Banjarnegara	6.29	6.70	6.90	7.80
5	Kab. Kebumen	5.87	7.41	7.05	7.61
6	Kab. Purworejo	6.06	7.07	6.24	7.14
7	Kab. Wonosobo	5.59	5.18	5.91	7.96
8	Kab. Magelang	8.83	9.05	9.93	9.14
9	Kab. Boyolali	7.77	7.09	7.78	8.31
10	Kab. Klaten	5.06	5.07	5.73	7.28
11	Kab. Sukoharjo	5.93	7.06	6.94	6.96
12	Kab. Wonogiri	5.74	6.49	5.64	7.96
13	Kab. Karanganyar	7.55	8.79	8.20	9.77
14	Kab. Sragen	6.79	7.84	7.58	8.30
15	Kab. Grobogan	6.14	6.95	6.27	6.40
16	Kab. Blora	6.76	5.29	6.88	7.53
17	Kab. Rembang	6.97	11.21	8.96	10.74
18	Kab. Pati	9.79	8.04	7.29	8.96
19	Kab. Kudus	10.23	8.56	8.92	9.51
20	Kab. Jepara	10.92	8.94	8.46	10.39
21	Kab. Demak	4.92	5.35	5.06	6.53
22	Kab. Semarang	10.85	11.18	10.81	13.76
23	Kab. Temanggung	8.82	7.47	6.95	7.42
24	Kab. Kendal	11.08	9.29	9.27	9.30
25	Kab. Batang	6.70	5.63	5.75	6.80
26	Kab. Pekalongan	5.66	7.21	7.08	7.94
27	Kab. Pemalang	7.28	7.72	8.16	8.15
28	Kab. Tegal	7.91	9.08	7.29	8.85
29	Kab. Brebes	4.95	4.59	5.60	7.23
30	Kota Magelang	10.46	10.19	10.71	15.16
31	Kota Surakarta	17.79	17.14	16.06	16.03
32	Kota Salatiga	10.81	11.72	10.03	12.61
33	Kota Semarang	26.89	27.23	25.09	23.36

**Rasio Kemandirian (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun
2006-2009 (lanjutan)**

34	Kota Pekalongan	6.34	6.58	6.27	6.36
35	Kota Tegal	26.17	21.47	18.80	20.06

LAMPIRAN 10

Derajat Desentralisasi (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	7.71	6.99	9.14	9.22
2	Kab. Banyumas	7.93	10.21	9.87	10.20
3	Kab. Purbalingga	8.47	7.88	8.41	9.88
4	Kab. Banjarnegara	5.92	6.28	6.46	7.24
5	Kab. Kebumen	5.54	6.90	6.59	7.08
6	Kab. Purworejo	5.72	6.61	5.87	6.66
7	Kab. Wonosobo	5.30	4.92	5.58	7.38
8	Kab. Magelang	8.11	8.30	9.03	8.38
9	Kab. Boyolali	7.21	6.62	7.22	7.67
10	Kab. Klaten	4.81	4.82	5.42	6.79
11	Kab. Sukoharjo	5.59	6.59	6.49	6.50
12	Kab. Wonogiri	5.43	6.10	5.34	7.38
13	Kab. Karanganyar	7.02	8.08	7.58	8.90
14	Kab. Sragen	6.36	7.27	7.04	7.66
15	Kab. Grobogan	5.78	6.50	5.90	6.01
16	Kab. Blora	6.33	5.03	6.44	7.00
17	Kab. Rembang	6.51	10.08	8.22	9.70
18	Kab. Pati	8.92	7.45	6.80	8.23
19	Kab. Kudus	9.28	7.89	8.19	8.68
20	Kab. Jepara	9.84	8.20	7.80	9.41
21	Kab. Demak	4.69	5.08	4.81	6.13
22	Kab. Semarang	9.79	10.06	9.75	12.10
23	Kab. Temanggung	8.10	6.95	6.49	6.91
24	Kab. Kendal	9.97	8.50	8.48	8.51
25	Kab. Batang	6.28	5.33	5.44	6.37
26	Kab. Pekalongan	5.36	6.73	6.61	7.35
27	Kab. Pemasang	6.78	7.17	7.55	7.54
28	Kab. Tegal	7.33	8.32	6.80	8.13
29	Kab. Brebes	4.72	4.39	5.30	6.74
30	Kota Magelang	9.47	9.25	9.67	13.16
31	Kota Surakarta	15.10	14.63	13.83	13.81
32	Kota Salatiga	9.75	10.49	9.11	11.20
33	Kota Semarang	21.19	21.40	20.06	18.94
34	Kota Pekalongan	5.96	6.17	5.90	5.98
35	Kota Tegal	20.74	17.68	15.83	16.71

LAMPIRAN 11

Rasio Ketergantungan Keuangan (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	92.29	89.96	86.39	85.26
2	Kab. Banyumas	92.07	89.79	84.08	82.72
3	Kab. Purbalingga	90.72	89.94	80.18	79.14
4	Kab. Banjarnegara	94.08	93.72	88.88	87.41
5	Kab. Kebumen	93.44	92.16	86.42	86.33
6	Kab. Purworejo	94.28	91.54	89.35	88.39
7	Kab. Wonosobo	94.70	93.15	88.76	87.47
8	Kab. Magelang	90.86	91.10	85.21	86.19
9	Kab. Boyolali	92.45	93.38	87.65	84.05
10	Kab. Klaten	95.19	95.18	88.98	86.83
11	Kab. Sukoharjo	94.41	93.41	87.23	87.76
12	Kab. Wonogiri	94.57	93.90	89.63	87.34
13	Kab. Karanganyar	92.98	91.92	83.07	85.49
14	Kab. Sragen	92.94	88.42	81.89	83.14
15	Kab. Grobogan	94.22	92.02	88.30	88.43
16	Kab. Blora	93.67	94.97	87.63	88.28
17	Kab. Rembang	89.60	89.59	86.41	85.29
18	Kab. Pati	91.08	90.54	83.91	85.89
19	Kab. Kudus	90.70	86.13	82.61	75.22
20	Kab. Jepara	90.16	87.99	84.76	83.18
21	Kab. Demak	95.31	94.07	87.86	87.57
22	Kab. Semarang	90.21	87.49	82.47	81.79
23	Kab. Temanggung	91.71	92.06	87.70	86.57
24	Kab. Kendal	88.64	91.50	85.28	85.13
25	Kab. Batang	90.56	91.26	87.62	89.05
26	Kab. Pekalongan	94.64	92.33	85.89	86.63
27	Kab. Pemasang	93.22	92.77	86.34	87.05
28	Kab. Tegal	92.39	91.66	86.57	86.49
29	Kab. Brebes	95.28	95.61	88.91	83.15
30	Kota Magelang	90.46	90.75	85.79	81.56
31	Kota Surakarta	84.90	83.17	74.07	68.91
32	Kota Salatiga	90.25	89.51	73.69	83.17
33	Kota Semarang	77.29	78.14	67.33	67.54
34	Kota Pekalongan	94.04	93.83	87.06	88.06
35	Kota Tegal	79.06	82.32	77.90	77.48

LAMPIRAN 12

Rasio Efektifitas Pendapatan (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	143.97	129.83	221.95	119.81
2	Kab. Banyumas	144.66	115.70	120.59	118.84
3	Kab. Purbalingga	112.16	120.46	113.47	120.78
4	Kab. Banjarnegara	143.58	122.87	111.18	122.25
5	Kab. Kebumen	261.32	106.91	108.64	103.09
6	Kab. Purworejo	110.96	120.90	129.26	128.08
7	Kab. Wonosobo	125.25	143.27	121.09	102.94
8	Kab. Magelang	121.28	116.04	113.93	108.67
9	Kab. Boyolali	140.12	156.10	118.49	117.84
10	Kab. Klaten	93.52	104.34	96.52	80.43
11	Kab. Sukoharjo	149.63	113.10	97.25	108.22
12	Kab. Wonogiri	142.23	117.77	130.34	81.96
13	Kab. Karanganyar	125.71	116.85	118.90	104.62
14	Kab. Sragen	144.23	128.99	121.38	126.51
15	Kab. Grobogan	120.47	122.37	134.21	164.38
16	Kab. Blora	119.43	141.19	110.64	99.39
17	Kab. Rembang	127.28	82.77	108.04	100.23
18	Kab. Pati	116.37	124.43	140.30	128.38
19	Kab. Kudus	107.67	104.66	126.72	116.30
20	Kab. Jepara	103.20	119.56	125.87	98.94
21	Kab. Demak	147.09	116.69	137.47	119.01
22	Kab. Semarang	125.33	111.06	119.36	100.22
23	Kab. Temanggung	88.15	99.71	102.93	118.43
24	Kab. Kendal	110.73	144.62	122.67	122.64
25	Kab. Batang	160.51	120.91	137.35	122.25
26	Kab. Pekalongan	125.03	114.07	117.87	121.47
27	Kab. Pemasang	156.43	123.95	126.93	152.48
28	Kab. Tegal	114.39	109.11	112.61	105.09
29	Kab. Brebes	143.81	188.64	156.91	123.35
30	Kota Magelang	141.93	124.70	119.30	96.62
31	Kota Surakarta	104.86	103.57	108.30	95.52
32	Kota Salatiga	127.63	118.96	131.63	133.50
33	Kota Semarang	112.75	102.80	113.10	118.00
34	Kota Pekalongan	86.39	134.13	138.34	143.00
35	Kota Tegal	112.17	105.76	117.87	139.18

LAMPIRAN 13

Rasio Efektifitas Belanja (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	112.09	333.13	57.66	112.09
2	Kab. Banyumas	96.81	134.97	83.88	99.30
3	Kab. Purbalingga	80.55	149.51	53.22	97.51
4	Kab. Banjarnegara	98.34	276.80	51.31	98.30
5	Kab. Kebumen	87.85	99.80	72.31	101.40
6	Kab. Purworejo	96.13	218.80	40.22	93.95
7	Kab. Wonosobo	101.07	511.64	45.77	102.89
8	Kab. Magelang	100.80	95.79	110.11	103.75
9	Kab. Boyolali	94.22	552.87	31.21	106.55
10	Kab. Klaten	92.47	325.62	28.64	99.26
11	Kab. Sukoharjo	95.00	265.97	44.53	102.69
12	Kab. Wonogiri	97.72	221.79	52.67	88.60
13	Kab. Karanganyar	90.33	177.32	49.16	98.02
14	Kab. Sragen	103.67	207.89	59.90	99.27
15	Kab. Grobogan	96.70	82.49	136.09	103.58
16	Kab. Blora	92.92	224.59	41.65	89.18
17	Kab. Rembang	79.95	75.47	88.12	95.39
18	Kab. Pati	83.98	81.03	89.86	92.62
19	Kab. Kudus	92.39	89.93	96.12	92.28
20	Kab. Jepara	102.33	222.89	58.47	98.78
21	Kab. Demak	96.64	301.32	49.62	98.66
22	Kab. Semarang	108.94	242.62	65.55	96.77
23	Kab. Temanggung	96.38	103.15	86.46	96.88
24	Kab. Kendal	90.74	217.23	57.06	94.62
25	Kab. Batang	111.50	240.15	56.41	94.84
26	Kab. Pekalongan	99.86	219.75	47.17	89.21
27	Kab. Pemasang	102.69	286.85	60.32	101.11
28	Kab. Tegal	88.12	214.36	48.89	88.79
29	Kab. Brebes	87.85	268.63	41.22	92.44
30	Kota Magelang	96.98	109.63	87.64	98.10
31	Kota Surakarta	98.09	442.05	35.36	91.97
32	Kota Salatiga	83.96	127.63	59.07	89.37
33	Kota Semarang	99.80	79.25	129.38	91.33
34	Kota Pekalongan	99.99	96.17	105.72	101.63
35	Kota Tegal	96.78	118.30	85.62	90.32

LAMPIRAN14

Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	18.71	4.12	25.12	17.48
2	Kab. Banyumas	32.34	14.21	11.45	12.19
3	Kab. Purbalingga	17.03	10.55	20.99	30.38
4	Kab. Banjarnegara	28.32	2.22	3.68	30.32
5	Kab. Kebumen	191.83	-41.36	8.00	7.54
6	Kab. Purworejo	17.66	47.00	6.09	18.84
7	Kab. Wonosobo	31.21	19.48	4.31	21.40
8	Kab. Magelang	17.72	12.61	15.88	-6.92
9	Kab. Boyolali	19.05	13.71	-5.49	16.09
10	Kab. Klaten	0.18	25.43	16.46	7.25
11	Kab. Sukoharjo	44.84	-3.54	-1.30	16.57
12	Kab. Wonogiri	43.40	5.15	7.55	-7.73
13	Kab. Karanganyar	34.25	23.61	13.26	3.88
14	Kab. Sragen	21.40	25.45	0.46	10.86
15	Kab. Grobogan	9.35	27.52	12.09	28.63
16	Kab. Blora	24.48	18.44	15.70	-1.01
17	Kab. Rembang	39.91	5.64	21.05	11.22
18	Kab. Pati	15.71	4.57	16.67	12.38
19	Kab. Kudus	17.43	7.54	29.61	16.12
20	Kab. Jepara	6.63	19.09	9.29	2.16
21	Kab. Demak	69.16	3.19	25.58	13.71
22	Kab. Semarang	17.90	6.36	17.05	8.98
23	Kab. Temanggung	31.75	10.24	8.28	25.39
24	Kab. Kendal	65.08	19.65	-5.39	7.14
25	Kab. Batang	33.17	-0.20	33.02	8.38
26	Kab. Pekalongan	5.93	37.46	18.41	16.62
27	Kab. Pemasang	59.00	-6.09	19.53	22.60
28	Kab. Tegal	12.16	17.66	-6.30	18.83
29	Kab. Brebes	31.85	34.11	11.70	11.65
30	Kota Magelang	27.55	-1.97	13.22	17.65
31	Kota Surakarta	18.91	13.80	15.09	-0.93
32	Kota Salatiga	16.79	11.54	24.75	15.29
33	Kota Semarang	18.47	5.97	12.46	14.26
34	Kota Pekalongan	-8.26	84.73	16.90	7.11
35	Kota Tegal	26.59	-2.30	11.74	30.58

LAMPIRAN 15

Rasio Pertumbuhan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009(%)

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Cilacap	49.36	29.20	9.88	-0.39
2	Kab. Banyumas	35.11	20.96	11.83	9.86
3	Kab. Purbalingga	22.43	28.34	27.13	5.26
4	Kab. Banjarnegara	33.51	20.46	17.34	2.67
5	Kab. Kebumen	49.29	44.84	-4.08	10.12
6	Kab. Purworejo	30.98	25.18	19.16	9.55
7	Kab. Wonosobo	29.87	23.94	16.81	10.21
8	Kab. Magelang	41.14	29.51	5.89	-0.39
9	Kab. Boyolali	24.02	39.32	7.42	2.23
10	Kab. Klaten	34.14	18.88	15.34	-1.90
11	Kab. Sukoharjo	47.85	30.12	13.22	-0.88
12	Kab. Wonogiri	37.05	5.13	33.24	6.77
13	Kab. Karanganyar	26.88	25.70	24.65	1.74
14	Kab. Sragen	46.68	18.49	14.80	0.25
15	Kab. Grobogan	28.80	27.06	17.79	-6.65
16	Kab. Blora	20.89	26.68	35.38	4.61
17	Kab. Rembang	47.64	31.27	9.80	-0.87
18	Kab. Pati	27.03	29.80	20.43	6.36
19	Kab. Kudus	11.29	26.77	20.29	19.67
20	Kab. Jepara	34.51	24.33	10.89	1.22
21	Kab. Demak	36.21	27.79	10.15	8.31
22	Kab. Semarang	42.17	22.80	21.79	-0.58
23	Kab. Temanggung	57.50	18.90	21.36	-0.72
24	Kab. Kendal	50.55	8.08	26.56	4.00
25	Kab. Batang	30.75	24.12	15.24	0.57
26	Kab. Pekalongan	32.44	21.08	24.34	2.49
27	Kab. Pemasang	49.15	11.66	17.82	10.01
28	Kab. Tegal	38.69	16.25	24.09	-2.86
29	Kab. Brebes	35.94	33.75	14.83	-4.80
30	Kota Magelang	40.89	30.75	21.79	6.89
31	Kota Surakarta	38.36	25.02	29.20	-1.69
32	Kota Salatiga	31.03	12.46	45.17	17.44
33	Kota Semarang	63.90	21.96	17.20	13.60
34	Kota Pekalongan	44.87	21.12	26.13	-3.26
35	Kota Tegal	17.86	14.31	18.47	16.05

LAMPIRAN 16

HASIL ANALISIS DESKRIPTIF VARIABEL

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
rasio kemandirian	138	3.82	28.04	8.7131	4.24308
derajat desentralisasi	138	4.39	21.40	8.2626	3.37997
rasio ketergantungan keuangan	138	67.33	95.61	87.7813	5.58674
rasio efektifitas pendapatan	138	80.43	261.32	122.2143	22.72682
rasio efektifitas belanj	138	28.64	552.87	117.9525	83.23725
rasio pertumbuhan pendapatan	138	.18	191.83	18.8644	20.21092
rasio pertumbuhan belanja	138	.25	63.90	21.3297	14.01864
pertumbuhan ekonomi	138	2.30	6.38	4.6217	.78473
pengangguran	138	3.10	15.74	7.5812	2.56756
kemiskinan	138	4.84	34.43	18.7698	6.72863
Valid N (listwise)	138				

LAMPIRAN 17

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI MULTIKOLINEARITAS

a. Persamaan Regresi Awal dengan Pertumbuhan Ekonomi

sebagai Variabel Dependen

Nama Variabel	Toleransi	VIF
Rasio kemandirian	0.048	20.705
Derajat desentralisasi	0.056	18.003
Rasio ketergantungan keuangan	0.288	3.476
Rasio efektifitas pendapatan	0.590	1.695
Rasio efektifitas belanja	0.851	1.175
Rasio pertumbuhan pendapatan	0.561	1.782
Rasio pertumbuhan belanja	0.710	1.409

b. Persamaan Regresi Awal dengan Pengangguran atau

Kemiskinan sebagai Variabel Dependen

Nama Variabel	Toleransi	VIF
Rasio kemandirian	0.047	21.190
Derajat desentralisasi	0.053	18.780
Rasio ketergantungan keuangan	0.280	3.574
Rasio efektifitas pendapatan	0.581	1.720
Rasio efektifitas belanja	0.848	1.179
Rasio pertumbuhan pendapatan	0.557	1.796
Rasio pertumbuhan belanja	0.707	1.414
Pertumbuhan ekonomi	0.799	1.251

**c. Persamaan Regresi Baru dengan Pertumbuhan Ekonomi
sebagai Variabel Dependen**

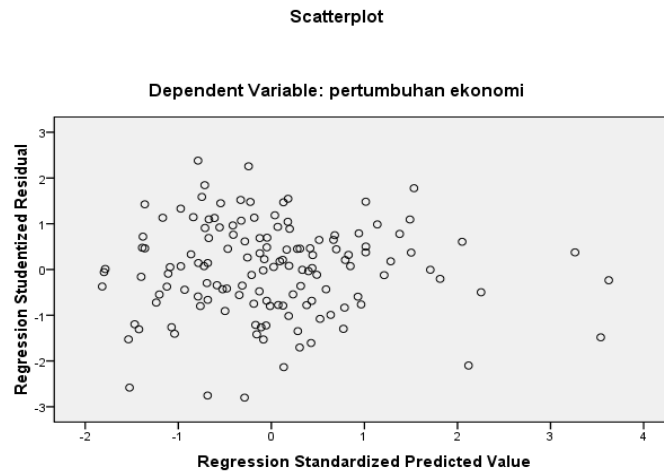
Nama Variabel	Toleransi	VIF
Rasio ketergantungan keuangan	0.804	1.244
Rasio efektifitas pendapatan	0.614	1.630
Rasio efektifitas belanja	0.898	1.114
Rasio pertumbuhan pendapatan	0.567	1.765
Rasio pertumbuhan belanja	0.805	1.242

**d. Persamaan Regresi Baru dengan Pengangguran atau
Kemiskinan sebagai Variabel Dependen**

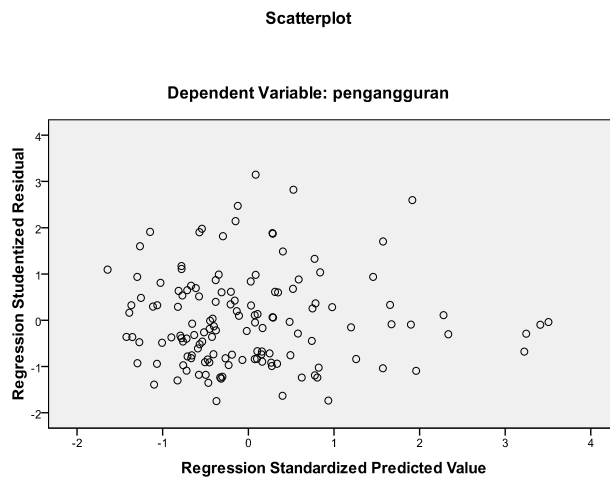
Nama Variabel	Toleransi	VIF
Rasio ketergantungan keuangan	0.702	1.425
Rasio efektifitas pendapatan	0.609	1.643
Rasio efektifitas belanja	0.890	1.123
Rasio pertumbuhan pendapatan	0.563	1.777
Rasio pertumbuhan belanja	0.804	1.243
Pertumbuhan ekonomi	0.842	1.187

2. UJI HETEROKEDASTISITAS

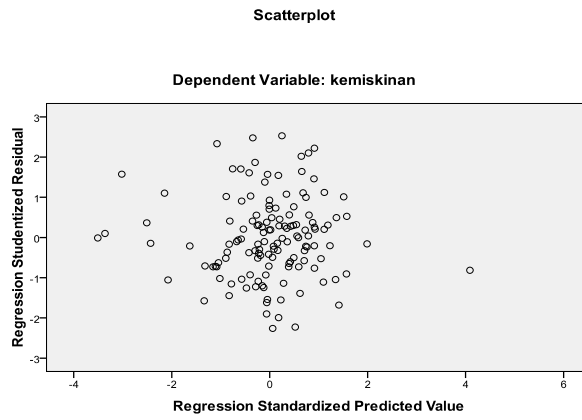
a. Pengujian Heteroskedastisitas Rasio Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.



b. Pengujian Heteroskedastisitas Rasio Kinerja Keuangan terhadap Pengangguran.



c. Pengujian Heteroskedastisitas Rasio Kinerja Keuangan terhadap Kemiskinan.



3. UJI AUTOKORELASI

a. Pengujian Autokorelasi Rasio Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.04124
Cases < Test Value	68
Cases \geq Test Value	68
Total Cases	136
Number of Runs	58
Z	-1.894
Asymp. Sig. (2-tailed)	.058

d. Median

b. Pengujian Autokorelasi Rasio Kinerja Keuangan terhadap Pengangguran.

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.30222
Cases < Test Value	68
Cases \geq Test Value	68
Total Cases	136
Number of Runs	53
Z	-2.754
Asymp. Sig. (2-tailed)	.058

a. Median

c. Pengujian Autokorelasi Rasio Kinerja Keuangan terhadap Pengangguran

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.44253
Cases < Test Value	68
Cases \geq Test Value	68
Total Cases	136
Number of Runs	82
Z	2.238
Asymp. Sig. (2-tailed)	.058

a. Median

LAMPIRAN 18

HASIL REGRESI DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL DEPENDEN

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.387 ^a	.150	.117	.73864

a. Predictors: (Constant), rasio pertumbuhan belanja, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.523	5	2.505	4.590	.001 ^a
	Residual	70.927	130	.546		
	Total	83.450	135			

a. Predictors: (Constant), rasio pertumbuhan belanja, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan

b. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.960	1.090		8.220	.000
	rasio ketergantungan keuangan	-.054	.013	-.385	-4.280	.000
	rasio efektifitas pendapatan	.003	.004	.101	.965	.337
	rasio efektifitas belanj	.001	.001	.086	1.009	.315
	rasio pertumbuhan pendapatan	-.004	.004	-.088	-.801	.424
	rasio pertumbuhan belanja	-.002	.005	-.028	-.305	.761

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi

LAMPIRAN 19

HASIL REGRESI DENGAN PENGANGGURAN SEBAGAI VARIABEL DEPENDEN

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.476 ^a	.226	.190	2.24965

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan

b. Dependent Variable: pengangguran

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	191.102	6	31.850	6.293	.000^a
Residual	652.859	129	5.061		
Total	843.961	135			

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan

e. Dependent Variable: pengangguran

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1.(Constant)	20.353	4.093		4.973	.000
rasio ketergantungan keuangan	-.205	.041	-.458	-4.985	.000
rasio efektifitas pendapatan	.030	.011	.276	2.736	.007
rasio efektifitas belanj	.003	.002	.108	1.312	.192
rasio pertumbuhan pendapatan	-.017	.013	-.130	-1.234	.220
rasio pertumbuhan belanja	.048	.015	.270	3.107	.002
pertumbuhan ekonomi	.083	.267	.026	.312	.755

a. Dependent Variable: pengangguran

LAMPIRAN 20

HASIL REGRESI DENGAN KEMISKINAN SEBAGAI VARIABEL DEPENDEN

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.601 ^a	.361	.331	5.44259

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan

b. Dependent Variable: kemiskinan

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2155.597	6	359.266	12.128	.000 ^a
Residual	3821.210	129	29.622		
Total	5976.806	135			

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, rasio efektifitas belanj, rasio efektifitas pendapatan, rasio pertumbuhan belanja, rasio ketergantungan keuangan, rasio pertumbuhan pendapatan

b. Dependent Variable: kemiskinan

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-50.003	9.901		-5.050	.000
rasio ketergantungan keuangan	.703	.100	.589	7.051	.000
rasio efektifitas pendapatan	.007	.027	.025	.268	.789
rasio efektifitas belanj	-.004	.006	-.047	-.632	.529
rasio pertumbuhan pendapatan	.076	.033	.224	2.341	.021
rasio pertumbuhan belanja	-.045	.037	-.095	-1.196	.234
pertumbuhan ekonomi	1.367	.646	.162	2.116	.036

a. Dependent Variable: kemiskinan

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim, *Statistik Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Penerbit EKONISIA, Yogyakarta, 2002.
- Ardi Hamzah, *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur*, Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak, 2007.
- Ardi Hamzah, Siti Nurhaeni, *Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengangguran dan Kemiskinan*, Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Volum 9, 2009.
- Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Bastian Indra, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Penerbit BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Penerbit BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota 2005-2010*, BPS, Jakarta.
- _____, *Data dan Informasi Kemiskinan 2007*, Badan Pusat Statistik, Semarang, 2008.
- _____, *Data dan Informasi Kemiskinan 2009*, Badan Pusat Statistik, Semarang, 2010.
- _____, *Jawa Tengah Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik, Semarang.
- Hadi Sasana, *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volum 10, 2009.
- Halim Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit UPP Akademisi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2001.

- Havid Sularso, Yanuar E Restianto, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, Media Riset Akuntansi Volum 1, 2011.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, UNDIP, Semarang, 2005.
- Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro dan Makro*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi 1, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Ravi Dwi Wijayanto, *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran Terhadap Kemiskinan: Sru di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2005-2008*, Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Todaro, MP, *Economic Development Sixth Edition*, Published by New York University, 1997.